

Wawancara: Achmad Hafisz Tohir / Kapan Pertamina Berubah?

AKTUAL

Edisi 32 | Tahun Ke-3 | 6-20 Maret 2015



RUMAH KACA KPK

Lewat Audit Kinerja BPK, Hadi Poernomo mengurai sepak terjang KPK disemua lini. KPK dibuat layaknya rumah kaca yang mengguncang penghuninya. Meskipun akhirnya Hadi harus "dikorbankan".

Rp 30.000

ISSN 2337-8395



9 772337 839509



ITISOLUTION
Inovasi Teknologi Inovasi
www.itisolution.co.id

HUBUNGI KAMI

021 9603 8184

021 9601 0850

SOLUSI UNTUK BISNIS DIGITAL ANDA

ITISOLUTION MENJADIKAN BISNIS ANDA MENJADI MUDAH

www.itisolution.co.id

PROMO FEBRUARI

20% OFF!



Kami menyediakan solusi bisnis dengan menggunakan teknologi terkini untuk membantu Anda dalam pengembangan Bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal.



Jasa Pembuatan Web

Kami menyediakan jasa website company profile, dan ecommerce mudah cepat dan user friendly.



Software dan Aplikasi

Melayani jasa pembuatan software dengan struktur dan profesional.



SEO dan SEM

Kami menawarkan layanan SEO profesional yang membantu meningkatkan website anda



Sosial Media Promosi

Melayani jasa promosi produk anda di setiap social media dan forum ternama.

"Pelayanan yang cepat serta di dukung oleh tim support yang telaten".

Rizky Agitama - CEO THEAGITAMA.COM

Email: sales@itisolution.co.id / Web: www.itisolution.co.id

AKTUAL

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Dhia Prekasha Yoedha

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki

Arief

SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa

REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar,

Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio

Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha

Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhony

REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby

Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto),

Sukardjito, Ismed Eka Kusuma

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia

Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu

Yusep, Ferro Maulana

STAF REDAKSI Soemitro-Deddy Kusnaedi-

Moh Sahlani (Majalah), Dhanu Akbar

Muhammad Daeng, Fadlan Syam Butho,

Maulana Khamal Macharani, Mochammad

Zhaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nailin

In Saroh, Nicha Muslimawati, Vina Fatma

Sari, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto),

Warnoto (TV)

IT Radius Rasmangun, Yudi Astira

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis,

WM Desangga

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu
(Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo

(Aceh), Albertus Vincentius (Kupang), Damai

Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad

Dasuki (Semarang), Ahmad Haris B (Surabaya),

Muhammad Nasrul Hamzah (Malang),

Bobby Andalan (Denpasar), Imam Muhlas

(Bojonegoro), Joko Pramono (Lumajang Jatim).

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febrianto

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkifli

SIRKULASI Widhi Maulana

MARKETING OFFICER Ajeng Rohmana,

Maradona Rambe, Ranie Anggoro

PERSONALIA Nurlail Qadr

ALAMAT REDAKSI

PT Caprof Media Negeri

Cawang Kencana Building

1st Floor Suite 101

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang

DKI Jakarta 13630 Indonesia

No Telp : (021) 8005520

Fax : (021) 80886466

Email : majalah@aktual.co

iklan@aktual.co

aktual.co
TERKANGAT TERPERCAYA

aktualTV

Naskah Kuno, Pembodohan Bangsa

Dina Y Sulaeman, jurnalis kandidat doktor hubungan internasional saat diskusi dengan seorang dosen filologi, terhenyak. Dina baru tersadarkan betapa naskah kuno sangat berharga bagi suatu bangsa. Eksistensi bangsa bisa terjaga bila naskah kunonya dijaga dan dipelajari.

Terbukti dari Surat Emas Raja-Raja Nusantara, lebih dari empat ratus tahun lalu, moyang kita para raja di Nusantara lazim menulis surat dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi (Huruf Arab-Persia) kepada para raja mancanegara, bahkan Eropa. Contoh, surat Sultan Iskandar Muda dari Aceh tahun 1615 untuk Raja Inggris, James I.

Surat itu tidak dalam bahasa Inggris. Sehingga, para raja dan petinggi mancanegara mau tak mau mempelajari bahasa Melayu. Di sini terlihat siapa yang lebih dominan dan kuasa. Itulah moyang kita, bangsa Nusantara.

Keunggulan budaya Nusantara itu tentu tidak sontak mendadak muncul tahun 1600-an. Pasti ada proses panjang yang mendahuluinya. Tapi, mengapa kini berbalik 180 derajat? Kenapa yang disebut sebagai budaya nenek moyang kita, bukan budaya yang unggul itu? Budaya yang mampu membunyah nasionalisme Indonesia, hingga memperkokoh sikap percaya diri saat bernegosiasi dengan bangsa lain. Bukan malah rendah diri menghadapi Barat, seperti mayoritas 'orang Indon' kini.

Mengapa kita, hari ini dihegemoni bahasa Inggris? Intelektual pun memaksa diri mahir berceletoh Inggris; agar tak diolok-olok. Dari keterperangahan Dina itu, muncul pertanyaan: mengapa naskah-naskah kuno Nusantara justru banyak disimpan di Belanda dan Inggris? Mengapa naskah itu jauh-jauh diangkut ke Eropa?

Mantan jurnalis di Islamic Republic of Iran Broadcasting tahun 2002-2007 ini, juga menemukan kisah tentang naskah kuno di suatu pulau di Indonesia yang 'konon' dihuni suku primitif. Naskah ini menyebut penduduk asli pulau itu lazim memanfaatkan sejenis tumbuhan liar guna mengendalikan kehamilan. Peneliti naskah, lagi-lagi orang Barat, lalu memproduksi obat anti hamil berdasarkan pengetahuan suku tersebut.

Bila penduduk asli pulau itu ratusan tahun lalu mampu menulis naskah itu, mengapa kini masih 'terbelakang'? Bukankah keberadaan naskah itu menunjukkan mereka dulu berperadaban tinggi. Lalu apa yang telah terjadi atas penduduk asli pulau yang sangat kaya bahan tambang, tapi sampai hari ini masih berpakaian primitif, bahkan masih mencari makan dengan berburu?

Alumnus Fakultas Sastra Arab Universitas Padjadjaran tahun 1997 ini, menilai semua pertanyaan tadi justru telah dijawab lugas sastrawan Ceko pemenang Nobel, Milan Kundera sebagai berikut: "Langkah pertama untuk memusnahkan suatu bangsa cukup dengan menghapuskan memorinya. Hancurkan buku-bukunya, kebudayaannya dan sejarahnya, maka tak lama setelah itu, bangsa tersebut akan mulai melupakan apa yang terjadi sekarang dan pada masa lampau. Dunia sekelilingnya bahkan akan melupakannya lebih cepat."

Karena itulah, di samping Jas Merah – Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, Bung Karno juga mengamanatkan Trisakti: yaitu Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Mampukah Jokowi mewujudkannya? ■

Laporan Utama

22 Program Mobnas Tetap di Bawah Bayang-bayang Jepang

Menelisik muasal program Mobnas Proton di Malaysia, ternyata masih sangat beraroma Jepang.



24 Otomotif, Mahar Perkawinan Politik Indonesia-Jepang

Salah satu pemain kunci yang mengatur hubungan bilateral Indonesia-Jepang melalui saluran informal adalah Soedjono Hoemardhani.



26 Mobil Nasional atau Taksi Nasional

Impian membangun kembali Mobil Nasional lewat Proton agaknya jauh panggang dari api.



28 Berhayal Mobnas Dari Mobil-Mobilan

Kerjasama pengembangan industri mobil nasional mendapat cibiran dari berbagai kalangan. Rencana bisnis Hendropriyono pun layu sebelum berkembang.



Laporan Khusus

36 Tawa Setelah Teraniaya

38 Tak Selamanya KPK Menang

42 Fitnah atau Fakta

44 Rumah Kaca KPK

46 Tangan Amerika Berangus Hadi Poernomo

48 Saat BPK Telanjangi KPK



10 NASIONAL

Lion Air: Can Make People Late

Delay hebat yang terjadi pada maskapai dengan slogan We make people fly itu justru membuat ribuan orang bukan hanya telat namun juga gagal terbang.

18 POLITIK

Proses Pelengseran Ahok Terbuka Lebar

Melalui hak angket, terbuka jalan lapang untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok yang penuh kontroversi.

30 WAWANCARA

"Penyertaan Modal Negara ke BUMN Tak Ada Deal dengan DPR"

Hafiz Thohir

50 HUKUM

Menanti Ujung Perseteruan Tutut vs Hary Tanoe

Tutut berpegang pada putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA), sementara Tanoe berpegang pada putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

54 ENERGI

Kapan Pertamina Berubah

Kecurigaan tentang kongkalikong dalam tender cukup beralasan karena Daniel Purba tidak bisa menjabarkan secara terang tentang harga yang disepakati dalam impor minyak mentah itu.

60 INTERNASIONAL

Melawan Skenario Pemecahbelahan Irak

Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari 2015. Selama sekitar dua minggu, ia dijadwalkan mengunjungi berbagai kota di negeri kaya minyak yang sering dilanda perang itu. Berikut ini adalah laporannya.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

16 Kilas Nasional

20 Kilas Politik

34 Kilas Ekonomi

52 Kilas Hukum

58 Kilas Energi

64 Kilas Nusantara

66 Oase

8 Lensa Aktual



Photo of The Year Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2014

Abraham Samad Resmi Tersangka



Status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dalam kasus "Rumah Kaca" baru ditetapkan pada Kamis (26/2) malam, kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso.

"Baru resminya kemarin malam. Usai gelar perkara," katanya di Jakarta, Jumat malam.

Ia mengaku, bahwa sebelumnya telah meminta penyidik untuk tidak terburu-buru menetapkan Samad sebagai tersangka kasus itu karena harus lengkap terlebih dahulu berbagai buktinya.

"Saya sebelumnya minta jangan terburu-buru (untuk menetapkan tersangka, red.). Harus dilengkapi (bukti-bukti, red.) dulu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kurang," katanya.

Ia membenarkan pernyataan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa Samad telah ditetapkan tersangka seminggu lalu.

Menurut Waseso, saat itu penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara, sedangkan penetapan tersangka secara resmi baru dilakukan pada Kamis (26/2) malam, setelah bukti lengkap.

Sebelumnya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa Ketua KPK nonaktif Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim atas laporan LSM KPK Watch Indonesia terkait dengan kasus dugaan pertemuan dengan pihak beeperkara.

"Iya sudah tersangka (Kasus Rumah Kaca, red.). Sudah seminggu lalu," kata Badrodin di Jakarta, Jumat.

Kasus Rumah Kaca itu merupakan laporan Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide, beberapa waktu lalu ke Bareskrim.

Pelaporan tersebut didasarkan pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad".

Dalam artikel tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politikus Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. Nebby Mahbubirrahmani/Ant

Tidak Ada Tradisi Perpecahan Dalam PAN

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyatakan, pemilihan ketua umum diserahkan sepenuhnya kepada para peserta kongres di Nusa Dua Bali.

"Kita serahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan pada para peserta. Selama ini kongres untuk memilih ketua umum selalu berjalan baik dan tidak ada tradisi perpecahan dalam tubuh PAN," ujarnya Sabtu (28/2).

Hatta Rajasa juga membantah adanya isu politik dalam kongres PAN di Nusa Dua Bali.

"Tidak ada itu money politics. Jika ada peserta datang dari jauh, wajar kan kita bantu uang transpor. Apa itu namanya money politics, kan tidak seperti itu," ujarnya.

Pembukaan kongres PAN akan berlangsung Sabtu malam.

Sejumlah perwakilan partai dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat akan hadir dalam acara pembukaan kongres. Partai yang baru dibentuk yakni Perindo juga akan hadir dalam acara pembukaan. Faizal Rizki/Bobby Andalan

Harga BBM Naik Lagi

PT Pertamina (Persero) menetapkan harga premium nonsubsidi di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp6.900 per liter mulai 1

Maret 2015 pukul 00.00 WIB.

Wakil Presiden Komunikasi Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Sabtu (28/2), mengatakan harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yang Rp6.700 per liter.

"Menyusul keputusan pemerintah, Pertamina menetapkan harga baru BBM jenis premium di Jawa-Bali dari semula Rp6.700 menjadi Rp6.900 per liter mulai 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB," ujarnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi menjadi barang subsidi.

Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali.

Sementara, solar dan minyak tanah tetap barang subsidi yang harganya ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga premium wilayah penugasan di luar Jawa-Bali mulai 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB naik Rp200 per liter karena adanya kenaikan harga premium di pasar Singapura (MOPS) sepanjang Februari 2015.

Siaran pers Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu, menyebutkan harga premium penugasan di luar Jawa-Bali yang per 1 Februari 2015 ditetapkan sebesar Rp6.600, naik menjadi Rp6.800 per liter mulai 1 Maret 2015.

"Sementara, harga BBM jenis lainnya yakni minyak tanah dan solar bersubsidi diputuskan tetap," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman.

Dengan demikian, menurut dia, harga minyak tanah dan solar subsidi masing-masing tetap Rp2.500, dan Rp6.400 per liter.

Saleh mengatakan kalau dilihat perkembangan harga minyak yang terjadi, seharusnya harga BBM jenis solar perlu dinaikkan.

Namun, kata dia, demi kestabilan perekonomian nasional, pemerintah memutuskan harga solar tetap.

Andy Abdul Hamid/Ant

DEMOKRASI DAN NOMOKRASI (1)



Di tengah kegaduhan euforia demokrasi, banyak orang dan aktor politik lupa pada pokok persoalan. Bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dalam kaitan ini, reformasi tata kelola negara menjadi kata kunci dalam perwujudan aspirasi demokrasi dan tujuan bernegara. Ledakan partisipasi massa dalam

fase transisi menuju demokrasi sering berujung dengan kekecewaan, ketika hiruk-pikuk perdebatan politik tidak punya persambungan dengan output pemerintahan. Oleh karena itu, ujung prosesi demokrasi harus bermuara pada perbaikan tata kelola kenegaraan yang sepadan dengan tuntutan demokratis.

Lebih dari itu, persoalan tata kelola negara memiliki konsekuensi yang lebih serius bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara-bangsa, yang memiliki kekhasan tersendiri di banding formasi negara-bangsa di Eropa. Dalam sejarah formasi kebanyakan negara-bangsa di Eropa Barat, perkembangan kesadaran kebangsaannya berjalan paralel dengan pembentukan negara. Sedangkan dalam banyak kasus di Eropa Timur, pembentukan negara-bangsa itu merupakan perpanjangan dari kesadaran etno-kultural.

Adapun di Indonesia, kehadiran negara kolonial mendorong kemunculan kesadaran nasional dan eksistensi negara nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, kebangsaan Indonesia juga tidak dipersatukan oleh kesamaan etnis, agama dan bahkan bahasa, melainkan oleh kehadiran dan pengakuan atas eksistensi negara persatuan berlandaskan prinsip-prinsip nomokrasi dan demokrasi yang disepakati bersama. Dengan demikian, negara merupakan pangkal pengada dari kebangsaan Indonesia. Tetapi dengan alasan yang sama, jika administrasi negara gagal

mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan negara, maka negara pun akan menjadi dasar penghancur dari kebangsaan Indonesia.

Peran penting dari administrasi negara itu kini mendapatkan tantangan yang serius dari arus globalisasi dan demokratisasi, yang mempengaruhi secara mendalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kita harus memperhatikan secara seksama implikasi dari penetrasi kedua arus tersebut terhadap administrasi negara, agar bisa memberikan respon yang tepat dan akurat, demi kemasahatan negara-bangsa Indonesia di masa depan.

Tantangan Globalisasi

Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa. Dunia memasuki suatu era globalisasi yang membawa fenomena baru dalam kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya.

"Globalisasi", seperti ditulis oleh Anthony Giddens (1990), "adalah intensifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya" (Globalization is the intensification of world-wide social relations Which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa).

Difasilitasi oleh revolusi di bidang telekomunikasi, transportasi dan turisme (Tripple-T), globalisasi merobohkan konsepsi "ruang" dan "waktu" konvensional yang mengarah pada restrukturisasi tata kelola kehidupan secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menyerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa, globalisasi menarik (pull away) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal untuk diserahkan ke otoritas (maya) global. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu kecil untuk menyelesaikan berbagai masalah global seperti isu perdagangan bebas, terorisme, human trafficking, dan global warming. Saat yang sama, globalisasi juga menekan negara-bangsa ke bawah, menciptakan tekanan baru bagi otonomi lokal. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal.

Dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (winners) dan "yang kalah" (losers, menimbulkan kesenjangan dunia yang kian menganga. Share dari seperlima penduduk termiskin dunia dalam pendapatan dunia (global income) jatuh dari 2.3 persen pada 1989 menjadi 1.4 pada 1998; sedangkan proporsi pendapatan dari seperlima penduduk terkaya terus meningkat. Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporat-korporat internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi

juga "global pillage" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi. Sebagai implikasi langsung, perkembangan global yang demikian akan mempengaruhi perekonomian nasional dalam jangka panjang dan mengingat sifat perekonomian yang makin terbuka.

Dalam pada itu, globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan "penunggang bebasnya" (free-rider) tersendiri. Mancur Olson mengingatkan bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang didirikan dengan tujuan menolong", justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes—yang mengandaikan peran negara dalam perekonomian. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan privatisasi di seluruh muka bumi, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan minimal state sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan negara untuk menentukan kebijakannya, diambil alih oleh peran pasar yang makin menguat. Situasi ini mendorong kebijakan negara yang berbias neoliberalisme, yang secara kuat mewarnai Indonesia sejak krisis moneter tahun 1998. Inti kebijakan ini adalah menempatkan pemerintah semata-mata sebagai regulator dan bukan sebagai aktor dalam dunia usaha. Di samping itu, pemerintah juga dipaksa untuk mengikuti kecenderungan global, khususnya membuka pasar domestik bagi kegiatan usaha asing.

Kebijakan pro-neoliberalisme terasa sekali pemaksaannya melalui LoI Indonesia dengan IMF yang secara mendalam mempengaruhi kebijakan dan administrasi publik lewat penyusunan dan perubahan perundang-undangan. Hal ini tercermin pada UU Migas, UU Sumber Daya Air dan UU Listrik yang baru, termasuk juga UU Penanaman Modal yang baru saja disahkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga dituntut menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan pasar dengan mengurangi hambatan-hambatan birokrasi bagi penanaman modal.

Dari Situasi Otoriter ke Situasi tanpa Otoritas

Berkurangnya kebebasan negara ini terjadi ketika negara-bangsa Indonesia sedang bertransformasi menuju demokrasi, yang menghendaki penguatan kapasitas dan efektivitas negara guna merespon meluasnya tuntutan rakyat di dalam negeri.

Tanpa itu, transisi menuju demokrasi, seperti yang berlangsung di Indonesia, kerap kali hanyalah membuat pendulum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas. Padahal, demokrasi memang bermaksud menghilangkan yang pertama, namun tak bisa ditegakkan tanpa yang kedua. Dan hari-hari ini, kita menyaksikan aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena lemahnya wibawa otoritas." ■





LENSA AKTUAL

Photo of The Year
Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2014

The Deadly Pacific Ring of Fire

Dua penduduk menyelamatkan korban saat letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (1/2/2014). Korban tewas akibat terkena awan panas Gunung Sinabung mengakibatkan 17 orang tewas termasuk anak-anak sekolah terkena luncuran awan panas Gunung Sinabung di Desa Suka Meriah yang berjarak 2 km dari kawah Gunung.

AFP - Sutanta Aditya

Lion Air: Can Make People Late

Ribuan orang gelisah di ruangan *boarding lounge* Lion Air Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta, Kamis (19/2). Hari itu tepat dengan tahun baru Imlek. Keramaian di bandara tidak seperti biasa. Sebagaimana besar warga Ibukota memanfaatkan hari libur nasional tersebut untuk liburan ke luar kota. Celakanya seluruh penerbangan maskapai Lion Air *delay* hebat sampai berhari-hari bukan hanya di Jakarta namun di seluruh Indonesia.

Delay hebat yang terjadi pada maskapai dengan slogan *We make people fly* itu justru membuat ribuan orang bukan hanya telat namun juga gagal terbang. Kemarahan akhirnya tidak dapat dibendung. Di Jakarta, calon penumpang maskapai milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rusdi Kirana itu bersitegang dengan pengelola bandara. Pasalnya manajemen Lion Air memilih untuk tidak berada di kantor perwakilan mereka.

Sejumlah fasilitas pun dirusak calon penumpang yang kesal. “Kerusakan mungkin *nggak* lebih dari Rp 100 juta, kita akan lihat lagi perjanjian kita. Kalau kewajiban *airline*, kita akan meminta Lion Air membayar. Jika tidak, kita di-*cover* asuransi,” kata Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi.

Lambatnya respon maskapai juga membuat banyak penumpang

hanya bisa menangis menerima nasib. Bukan cuman pelancong lokal. Warga Negara Asing (WNA) juga menerima nasib serupa. Bahkan ada penumpang yang menderita kerugian puluhan juga akibat tiketnya untuk pulang ke Australia hangus akibat penundaan terbang. Di sejumlah bandara keluhan kelaparan sampai muntah-muntah jamak diderita calon penumpang.

Ketegasan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kembali diuji. Publik berharap Jonan tegas seperti saat berhadapan dengan maskapai asal Malaysia Air Asia. Namun pernyataan Jonan pada tanggal 21 Februari justru jauh dari harapan. Ia menyebut tidak ada sanksi yang diberikan untuk kelalian kali ini. “Kasus Lion itu adalah kasus menelantarkan penumpang yang sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan No 77 tentang *service recovery* namun tidak ada sanksinya bila lalai dijalankan,” kata Jonan.

Sosok tegas Jonan seolah tak berkutik pada kejadian *delay* Lion Air. “Masih segar dalam ingatan saat kasus AirAsia, Menteri Jonan gagah perkasa marah-marah. Tapi kenapa saat Lion Air Menteri Jonan ‘menghilang’?,” kata Tulus pengurus harian YLKI.

Kata dia, kejadian Lion Air ini selalu berulang dan tak pernah ada sanksi tegas pada maskapai ini.



TINO OCTAVIAN/ AKTUAL



Calon penumpang terlantar di Terminal 1B tanpa ada petugas, Ratusan penumpang Lion Air terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.



Rusdi Kirana

“Katanya Menteri Jonan pemberani, sekarang tunjukkan,” sambungnya.

Sikap ‘diam’ Jonan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, pertanyaan publik, Jonan takut dengan pemilik Lion Air Rusdi Kirana yang juga Wantimpres.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan sebagai Menhub Ignasius Jonan jangan takut untuk menindak tegas maskapai Lion Air dengan segera membekukan ijin penerbangan. Pasalnya, banyak yang menilai Menhub Jonan melunak karena pemilik Lion Air adalah Rusdi Kirana yang juga Wantimpres. “Iya, Jonan lebih cinta pada jabatannya sebagai menteri daripada membela kepentingan publik,” katanya.

Sementara itu, Komisi V DPR mendesak Jonan tegas dalam kasus *long delay* Lion Air menyengsarakan ribuan penumpang. Kemenhub diminta berani menindak tegas maskapai milik politisi PKB dan anggota Wantimpres Rusdi Kirana itu. “Nggak ada masalah, yang punya Presiden pun, di hadapan hukum sama. Masyarakat harus dilindungi, Kemenhub harus berani memberikan

sanksi,” kata Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana saat dihubungi, Jumat (20/2).

Terpisah, pihak Lion Air secara resmi meminta maaf atas keterlambatan penerbangan pesawat yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Lion Air juga mengambil keputusan semua penerbangannya pada Jumat 20 Februari ini dari pukul 17.00-24.00 WIB dibatalkan. “Kami memohon maaf sebesar-besarnya,” sebut Direktur Umum Lion Air Edward Sirait di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (20/2).

Edward menegaskan, penyebab Lion Air mengalami penundaan penerbangan lantaran 3 pesawatnya mengalami kerusakan karena tertabrak burung.

Maskapai "Singa" Pembuat Masalah

Lion Air memiliki catatan buruk dalam penundaan jam keberangkatan atau *delay*. Puncaknya, pada *long delay* pada tanggal 18-21 Februari 2015 lalu.

Dalam data yang diperoleh Aktual, tercatat *On Time Performance* Lion Air dibawah 50 persen. Adapun rinciannya, pada tanggal 18 Februari

2015 dari total jumlah penerbangan sebanyak 526, tercatat hanya 37,6 persen yang *on time* penerbangannya, sisanya mengalami *delay*.

Pada tanggal 19 Februari 2015 dari 483 penerbangan, persentase *on time* nya hanya berkisar 22,2 persen, 87,8 persen lainnya mengalami *delay*. Sedangkan di tanggal 20 Februari 2015, dari jumlah penerbangan sebanyak 438 penerbangan hanya 40,4 persen saja yang *on time*.

“Dan di tanggal 21 Februari hanya 48,9 persen saja pemberangkatan yang *on time*,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Sementara itu, Komisi V DPR RI mencium belum adanya ijin frekuensi dalam kasus *delay* Lion Air. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura menegaskan, sebelum insiden *delay* Lion Air telah menjual tiket namun belum mendapat ijin terbang. Ijin rute sudah dikantongi namun ijin terbang (diluar frekuensi yang ditetapkan) belum diperoleh.

“Mismanajemen di Lion Air menabrak aturan dan terlalu memaksakan diri untuk jual tiket sebanyak-banyaknya tapi tidak memperhatikan kemampuan dan ketersediaan SDM,” sergahnya.



Edward Sirait

“Indikasi menunjukkan kalau manajemen Lion Air memang bobrok, dan apapun yang dilakukan regulator atau pemerintah jangan melanggar undang-undang,” sambungnya.

Selain masalah itu, tuduhan penggelapan asuransi *delay* yang dilakukan Lion Air disampaikan masyarakat.

Direktur Executive Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita menduga maskapai Lion Air telah menggelapkan uang asuransi keterlambatan penerbangan (*delay*) sebesar Rp 15.000 per penumpang. Dana *delay* tersebut disetor dan disatukan dengan harga tiket yang dibayar oleh penumpang saat membeli tiket.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Pengangkut

Angkutan Udara, terutama pada pasal 1 dan 2, mewajibkan setiap maskapai penerbangan untuk mengasuransikan keterlambatan penerbangan (*delay*).

Dijelaskan oleh Kisman, sejak periode 2011 - 2014 Lion Air mengangkut penumpang rata-rata 25 juta setiap tahun. Dalam tiga tahun terakhir Lion Air mengangkut sekitar 75 juta penumpang.

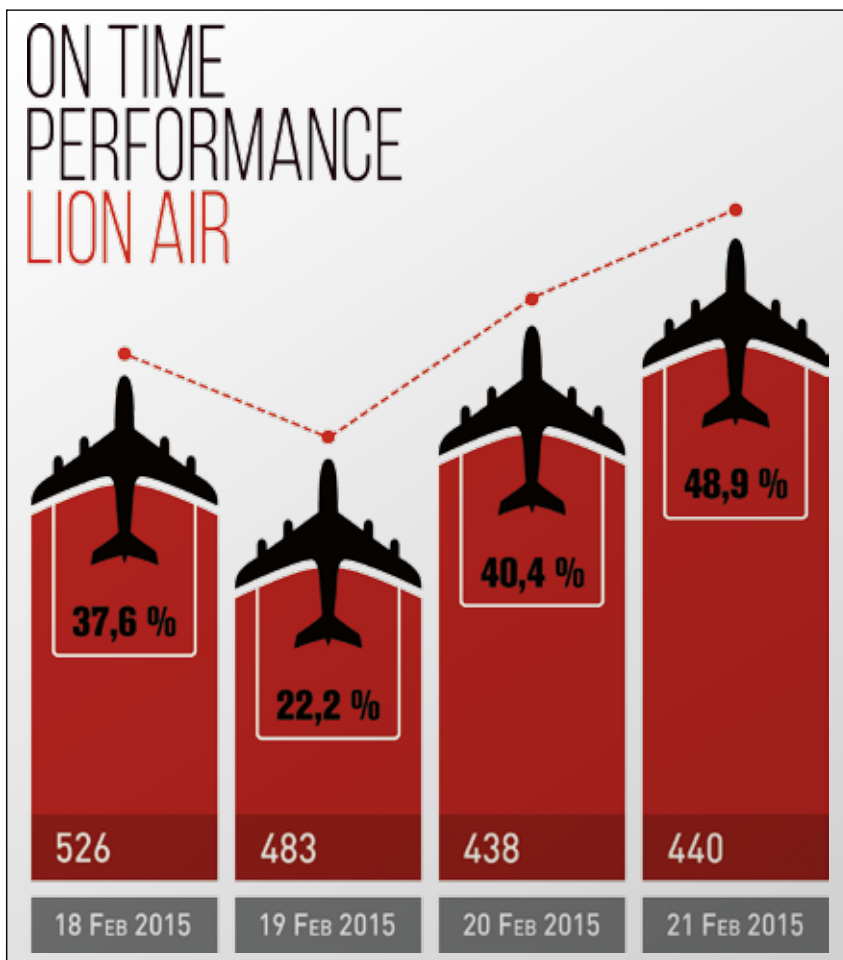
“Jika Lion Air memungut Rp. 15.000 saja dari setiap penumpang, maka total dana *delay* yang dipungut oleh Lion Air sebesar Rp 1,125 triliun,” ujar Kisman Latumakulita yang juga fungsionaris Partai NasDem dalam siaran pers yang diterima Aktual, Selasa (24/2).

Harga asuransi *delay* bervariasi antara Rp 10.000 - Rp 25.000 setiap penumpang. Harga tengahnya Rp 15.000 per penumpang. Lazimnya disatukan dengan harga tiket, sehingga setiap keterlambatan sudah ada jaminan asuransinya. Tidak perlu lagi ditalangi oleh PT Angkasa Pura seperti yang terjadi sekarang.

“Jika kekacauan penerbangan Lion Air selama tiga hari minggu kemarin, yang mengakibatkan ribuan penumpang Lion Air tidak terangkut karena *delay*, maka bisa langsung dibayar oleh perusahaan asuransi. Namun bila tidak dibayar oleh perusahaan asuransi, maka patut diduga manajemen Lion Air tidak menyetorkan asuransi *delay* sekitar Rp 1,125 triliun ke perusahaan asuransi,” ujar Kisman.

“Bila terbukti Lion tidak menyetorkan asuransi *delay* ke perusahaan asuransi, maka ada dua langkah yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, menggugat secara perdata Lion Air ke pengadilan, termasuk laporan pidana penggelapan ke polisi. Kedua mendesak Menteri Perhubungan untuk mencabut sementara izin operasional Lion Air satu sampai tiga bulan,” ujar mantan wartawan beberapa media massa nasional tersebut.

Tak hanya itu, permasalahan *refund* tiket pun, Lion Air harus ditalangi dana *cash* oleh PT





Calon penumpang pindah dari terminal 1B menuju terminal 3 untuk mengurus pengembalian biaya tiket, Ratusan penumpang Lion Air terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Angkasa Pura II. Alasan pihak Lion Air saat itu, karena keterbatasan dana *cash* yang ada di Bandara Soekarno Hatta.

“Karena jumlah penumpang banyak dan diperkirakan mencapai 2 ribu sampai 3 ribu orang, kami sediakan dana Rp 4 miliar. Tapi ternyata karena *refund* tiket dibayar untuk penumpang yang membatalkan penerbangan sampai jam 12.00 WIB, maka jumlahnya 548 penumpang dengan total pembayaran Rp 526.893.500,” kata Direktur Utama

PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya.

Ringannya Sanksi Buat Lion Air

Kementerian Perhubungan membekukan sementara permohonan izin rute baru dan melakukan audit secara komprehensif terhadap Lion Air.

“Kami bekukan permohonan izin rute baru sampai Lion Air bisa meyakinkan pemerintah mengenai SOP dalam menangani krisis akibat membatalkan penerbangan. Kementerian Perhubungan juga adakan audit secara komprehensif terhadap Lion Air,” ujar Dirjen Perhubungan Udara, Suprasetyo, di gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (23/2).

Selain pembekuan izin rute

baru tersebut, Kemenhub juga membekukan izin terbang bagi rute yang selama 21 hari tidak diterbangkan Lion Air. Salah satu rute tersebut adalah rute Ujungpandang-Jayapura.

Suprasetyo mengatakan, maskapai yang tidak menerbangkan rute selama 21 hari secara otomatis membekukan izin penerbangan rute yang dituju. Maskapai kemudian harus mengajukan izin ulang kepada Kemenhub untuk mengaktifkan rute tersebut.

“Khusus Lion Air, mereka tidak bisa mengajukan kembali izin rute tersebut sampai SOP selesai dibuat dan disampaikan kepada kemenhub,” ujarnya

Pihaknya mengaku sudah



memberi teguran keras pihak Lion Air terkait kejadian penelataran penumpang dan meminta agar tak mengulanginya.

Namun, sanksi Kemenhub terhadap Lion Air dinilai sangat ringan. Bandingkan dengan sanksi pembekuan permanen yang dilakukan terhadap Maskapai AirAsia dan lainnya.

Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro meminta Kemenhub berikan sanksi pencabutan ijin terbang bagi maskapai 'Raja Delay' berlogo singa meskipun pemiliknya merupakan anggota Wantimpres.

"Saya meminta pencabutan

izin bagi maskapai raja *delay* Lion walaupun pemiliknya adalah anggota Wantimpres," ujar Nizar di Jakarta, Rabu (25/2)

Menurutnya, selain Kemenhub berikan teguran dan pembekuan sementara ijin rute baru Lion Air, harus juga melakukan audit pelanggaran undang-undang.

"Kemenhub harus melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar UU, aturan dan rekomendasikan bahkan beri sanksi tidak hanya teguran dan pembekuan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V **Yudi Widiananda** mengusulkan Kemenhub merevisi

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara.

"Saya usul agar Permen 77 direvisi sehingga ada sanksi terhadap *delay* yang lebih berat," ujar Yudi

Yudi mengatakan perlu adanya sanksi yang lebih berat terhadap maskapai yang berulang kali melakukan *delay*, bukan hanya memberikan kompensasi Rp.300ribu kepada penumpang korban *delay* lebih dari 4 jam.

"Penambahan sanksi tidak sekedar menyediakan makanan, hotel dan uang pengganti, tetapi sampai ke peringatan, pembekuan dan pencabutan operasi maskapai," tutupnya. ■

Nailin In Saroh, Novrizal Sikumbang, Soekardjito





Menurunnya harga minyak mentah dunia membuat berkurangnya penerimaan negara dalam sektor migas dan minerba. Sebab itu pemerintahan Joko Widodo memerlukan dukungan rakyat, terlebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah saat ini tengah sekarat.

Ekonomi Pemerintahan Jokowi Sedang Sekarat

"Tingginya beban bunga dan utang jatuh tempo juga ditengarai banyak menyedot APBN 2015. Sementara untuk mendapat utang baru, belum tentu Pemerintahan ini dipercaya kancan internasional," ucap pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng, di Jakarta, Senin pekan lalu.

Menurutnya, salah satu cara yang dapat ditempuh Jokowi adalah memeras bangsa sendiri melalui beberapa kebijakan. Yakni dengan menaikkan pajak dari sektor konsumsi, deposito/tabungan dan menaikkan cukai tembakau.

Langkah lain bisa dilakukan dengan memperluas pajak atau memajaki apa saja termasuk batu akik yang sedang trend. Kemudian menaikkan bunga setinggi tingginya untuk menyedot penerimaan dari obligasi negara.

Ditambahkan Salamuddin, cara-cara tersebut adalah yang paling instan untuk mendapatkan penerimaan negara. Pemerintah dituntut lebih tega dan agresif

memburu pajak untuk membiayai APBN 2015 dan perekonomian bangsa Indonesia.

Langkah demikian dilakukan karena cicilan dana bunga utang luar dan dalam negeri yang jatuh tempo dan terus meningkat. Kedua, Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN-BUMN. Ketiga, menalangi Perusahaan perusahaan nasional yang mengalami krisis anggaran karena utang luar negeri yang besar.

Selain itu pemerintahan Jokowi juga dipaksa untuk memberikan setoran kepada pengusaha-pengusaha di sekitar penguasa melalui berbagai mega proyek infrastruktur.

"Hal tersebut terlaksana hanya jika semua Rakyat urunan dengan bersedia untuk dipajaki setinggi tingginya atas; Upah yang diterima, Deposito/tabungannya di Bank Bank, konsumsi atas barang mewah seperti batu akik, dll, maka APBN pemerintahan Jokowi bisa diselamatkan," demikian Salamuddin. / Ismed Eka Kusuma

Dibawah Jonan, Negara Absen Dalam Kemelut Penerbangan

Kecerobohan maskapai penerbangan Lion Air yang terlalu banyak melakukan *delay* memaksa Direksi PT Angkasa Pura II menalangi pengembalian uang tiket para penumpangnya. Hal yang memicu pertanyaan besar terkait keuangan perusahaan Lion dan tindakan pilih kasih Menhub Ignasius Jonan.

"Bukan hanya disaat liburan Hari raya Imlek saja Lion Air merugikan para penumpang dengan *delay* berhari-hari. Bulan Juni 2011, manajemen Lion Air dipanggil Kemenhub karena mendapat peringatan keras akibat keterlambatan yang hampir mirip," ujar Ketum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, di Jakarta, Senin

pekan lalu.

Saat itu, manajemen mengaku *delay* secara beruntun karena migrasi sistem penjadwalan kru dan cuaca buruk yang terjadi. Kementerian Perhubungan kemudian memutuskan tidak memberikan sanksi apapun.

Tahun 2013 Komisi Perhubungan DPR sudah meminta Kemenhub tidak memberikan izin penambahan rute bagi Lion untuk sementara waktu. Khususnya bagi rute penerbangan yang kerap terlambat dan merugikan konsumen.

"Ini membuktikan negara tidak hadir saat perusahaan penerbangan milik Anggota Wantimpres Rusdi Kirana telah membuat kerugian pada masyarakat. Ketidakhadiran negara terbukti lagi ketika Menteri Jonan

tidak turun tangan untuk memberikan sanksi tegas kepada Lion Air,"

"Kalau dengan Lion Air Pemerintah tidak tegas untuk menindak dan menghukum dengan sanksi berat, menghentikan sementara Izin Operasi Lion Air, artinya pemerintah tidak punya niat melindungi masyarakat. Untuk itu Presiden Jokowi harus mencopot Menteri Perhubungan yang terkesan penakut terhadap pemilik Lion Air," kata Jonan. / Ismed Eka Kusuma





Anggaran Naik Drastis, BPK Awasi Penggunaan Dana Desa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi ketat penggunaan dana desa yang naik drastis menjadi Rp20,8 triliun pada APBN-Perubahan 2015. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran dan pelaksanaannya di lapangan.

Untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, BPK meminta pemerintah pusat mengintensifkan sosialisasi peraturan penggunaan dana desa kepada aparat desa.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan, dana desa di APBN-P mengalami kenaikan sebesar Rp11,7 triliun dibanding APBN 'baseline' 2015 menjadi Rp20,8 triliun. Besaran itu akan disalurkan kepada sasaran desa yang berjumlah 74.093 desa.

"Di sisi pemerintah juga belum selesai, apakah di Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," tegasnya di Jakarta, Rabu dua pekan lalu.

Penggunaan dana desa sesuai amanah konstitusi Pasal 23 UUD 1945 harus dikelola untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sistem alokasi dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. / Ismed Eka Kusuma

Revolusi Mental Digangnam Style

Organisasi Muhammadiyah diharapkan membantu pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam mewujudkan program besar Nawa Cita. Harapan itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Gedung Dakwah Pusat Muhammadiyah, Menteng, Senin pekan lalu.

Menurutnya, konsep Nawa Cita merupakan program prioritas Jokowi - JK dalam rangka mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaulat. Muhammadiyah dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam membantu program tersebut.

"Saya berkeinginan Muhammadiyah menjadi organisasi yang bisa bersama-sama pemerintah bahu-membahu mewujudkan sembilan program Nawa Cita," katanya.

Salah satu kunci

terlaksananya program pemerintah yakni adanya dukungan dari semua pihak. Dengan kata lain tidak bisa tanggungjawab itu dibebankan sepenuhnya ke pemerintah, melainkan juga lembaga pendidikan formal dan non formal.

Puan menyinggung menurunnya jati diri bangsa Indonesia dikalangan generasi muda. Salah satunya tren yang terus bermunculan dan mereka terus mengikutinya. Padahal tren itu jauh dari nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia.

"Seolah-olah kita malu kalau tidak (bisa) nyanyi *Gangnam Style*, tapi tidak pernah malu kalau tidak bisa nyanyi Indonesia Raya," kata dia.

Disinilah perlunya revolusi mental yang menjadi program pemerintahan Jokowi.

Program yang diharapkan bisa menjaga budaya bangsa Indonesia. / Sumitro



Kongres PAN, Pertarungan 'Besan'?

Dua kandidat caketum yang bertarung dalam kongres PAN, Hatta Rajasa (*incumbent*) dengan Zulkifli Hasan, dinilai tidak lepas dari 'politik besan'.

Seperti diketahui Hatta adalah besan Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Zulkifli besan Ketua MPP PAN Amien Rais.

Berdasarkan hasil sensus CSIS-Cyrus, Hatta Rajasa berhasil memperoleh dukungan 42.77 persen sementara Zulkifli Hasan 38.64 persen, untuk tingkat Kabupaten/Kota.

"Dari 484 tingkat Kabupaten/Kota Hatta Rajasa masih unggul," ucap peneliti CSIS, Arya

Fernandes, di Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

"Kita tunggu saja, pak SBY yang menang atau pak Amien yang menang," tambahnya.

Sensus CSIS-Cyrus Network ini dilakukan dengan melibatkan 500 peneliti yang disebar di 34 provinsi, dan dilakukan pada 16-19 Februari 2015. Disebut

sensus karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pimpinan partai di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.



/ Karel Stefanus Ratulangi - Novrizal Sikumbang

DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket (hak melakukan investigasi) kepada Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok terkait kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Proses pelengseran bekas Politikus Golkar dan Gerindra ini pun mendekati kenyataan.

Suasana kompak penuh semangat terasa dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/2). Dengan palu di tangan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bertanya kepada para anggota DPRD apakah setuju menggunakan hak angket? 92 Dari 106 Anggota DPRD yang hadir pun langsung berteriak Setuju....! Prasetyo lantas mengetok palu sidangnya sebagai tanda pengesahan, kemudian disambut suara takbir “Allahu Akbar” para anggota DPRD.

Peristiwa ini bisa menjadi momen bersejarah dalam percaturan politik ibu kota Jakarta. Melalui hak angket, terbuka jalan lapang untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok yang penuh kontroversi. Mengacu pada tata tertib DPRD, keputusan akhir dalam penyelidikan DPRD dapat berujung pada pelaporan kepada aparat hukum terkait temuan unsur pidana dalam kebijakan eksekutif. Penggunaan hak angket juga bisa bermuara pada pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI.

Hak angket sendiri didasari dua dugaan pelanggaran yang



Proses Pelengseran **Ahok** Terbuka Lebar

dilakukan Ahok. Pertama tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta 2015 kepada Mendagri yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pelanggaran kedua

menyangkut norma etika perilaku yang ditunjukkan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan pasal 19 tata tertib DPRD, hak angket ini akan dijalankan melalui 33 anggota panitia angket

KRONOLOGI HAK ANGKET DPRD DKI JAKARTA

27 Januari 2015

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melalui sidang paripurna menyetujui APBD 2015 sebesar Rp 73,083 triliun.

2 Februari 2015

Pemprov DKI pun langsung menyerahkan APBD yang telah disetujui bersama ke Kemendagri.

6 Februari 2015

Kemendagri mengembalikan Dokumen APBD 2015 karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Kemendagri mempersoalkan adanya berkas lampiran yang tak sesuai aturan. Termasuk penemuan kesalahan format yang digunakan Pemprov DKI karena seluruh penyusunan APBD-nya menggunakan *e-budgeting*.

9 Februari 2015

Ahok menduga ada oknum DPRD yang ikut campur tangan dalam pengajuan format APBD 2015 DKI ke Kemendagri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Abraham Lunggana (kiri), Muhammad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kedua kanan) dan Ferial Sofyan (kanan) mengangkat tangan usai memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2).



yang akan bekerja dalam waktu dua bulan. Nasib Ahok berada di ujung tanduk jika panitia hak angket berhasil membuktikan pelanggaran yang dilakukan eksekutif. “Kalau ada unsur pidana dilaporkan ke penegak hukum atau pemberhentian. Peluang kedua-duanya 50%-50%,” ucap Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik.

Munculnya hak angket bukan secara tiba-tiba. DPRD dan Pemprov pada awalnya sudah satu suara menyetujui Raperda tentang APBD

DKI Jakarta 2015 dengan alokasi dana Rp73,08 triliun. Namun Ahok menyampaikan Raperda versi lain ke Kementerian Dalam Negeri dengan konsep *e-Budgeting* yang tanpa melalui persetujuan DPRD.

Ahok beralasan, pengajuan Raperda APBD 2015 dengan konsep *e-Budgeting* dilakukan karena Raperda APBD 2015 yang disepakati dalam sidang paripurna berisi dana siluman. Dia menuding legislatif telah ‘menyunat’ anggaran sebesar 10-15 persen dari program-program unggulan Pemprov hingga muncul Rp 12,1 triliun yang dialokasikan untuk pos yang dinilainya tidak logis. Akibat tudingan ini, semua anggota DPRD berang dan kompak menyetujui hak angket.

“Kami menganggap gubernur melakukan *contemp of parliament*,” ujar Anggota fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan.

Fahmi menjelaskan, Ahok dapat disebut melanggar Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Tak cukup sampai di situ, Ahok juga diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Alih-alih melunak, Ahok justru menambah kegaduhan dengan menantang para anggota DPRD untuk memakai hak konstitusionalnya tersebut. Dia berencana mengungkit dugaan adanya dana siluman selama dua tahun ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Silakan saja (hak angket). Kami juga akan kirim surat kepada anggota DPRD menanyakan anda setuju ada temuan BPKP selama dua tahun yang mengatakan ada penemuan anggaran siluman dulu. Dari sinilah kami mau *e-budgeting*,” tuntas Ahok.

Kisruh antara Ahok dan DPRD masih terus bergulir. Akibat kisruh ini, APBD DKI Jakarta 2015 tak kunjung disetujui Kementerian Dalam Negeri, sehingga program-program untuk rakyat ibu kota terbengkalai. ▀

Moh Sahlan

11 Februari 2015

Ahok teriak-teriak kepada DPRD karena mempermasalahkan ketiadaan tanda tangan mereka dalam dokumen APBD yang dikirimnya ke Kemendagri.

23 Februari 2015

Setelah Mendagri Tjahjo Kumolo mengirimkan tim untuk membantu menyelaraskan APBD 2015. Pemprov pun mengklaim sudah memperbaiki serta melengkapi dokumen untuk dikembalikan ke Kemendagri.

24 Februari 2015

Ahok kembali berkoar-koar bahwa DPRD menyelipkan ‘dana siluman’ dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Anggaran itu disebut muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari.

26 Februari 2015

DPRD menggelar paripurna pengajuan hak angket. Panitia angket terdiri atas 33 anggota DPRD dan akan bekerja melakukan investigasi selama dua bulan.

Saat APBNP 2015 Disusupi Anggaran Siluman

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai alokasi anggaran sebesar lebih dari Rp 3,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (13/2) sebagai anggaran siluman.

Lebih lanjut Uchok mengatakan anggaran siluman yang tiba-tiba muncul tersebut karena ketidakjelasan program pemerintah, akibatnya program dadakan bisa muncul diakhir pembahasan. "Ini seperti kucing dalam karung," cetus Uchok, Minggu pekan lalu.

Melihat kondisi tersebut Uchok berharap DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa terus mengawasi program dan penggunaan anggaran dengan ketat untuk mencegah penyelewengan akibat longgarnya pembahasan APBNP 2015.

Anggaran yang tiba-tiba muncul tersebut, seperti yang tertulis dalam Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam angka Pembahasan APBNP 2015, terdapat di Kementerian Agama sebesar Rp 2,8 T, Kementerian Dalam Negeri Rp 1,37 T, Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp 876 Milyar yang akan dipergunakan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, anggaran Badan Narkotika Nasional untuk rehabilitasi korban narkoba sebesar Rp 500 Milyar, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Rp 481,5 Milyar dan anggaran Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk *roadmap* dan operasionalisasi kegiatan revolusi mental sebesar Rp 149 Milyar. /Deddy K



Perselisihan KIH-KMP Usai, Kini Muncul Konflik Internal KIH

Kursi Wakil Ketua Komisi I DPR RI menjadi rebutan sesama fraksi partai koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo, yakni FPDIP dan FPPP, keduanya ngotot untuk menempatkan kadernya TB Hasanuddin dan Syaifullah Tamliha sebagai wakil ketua di komisi pertahanan tersebut. Perselisihan ini kemudian menyebabkan fraksi koalisi pendukung pemerintah meminta Pimpinan DPR untuk menunda pemilihan wakil pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPR lain, seperti Komisi X, Badan Legislasi dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Menurut Sekretaris FPDIP Bambang Wuryantodi Jakarta, (Minggu, 15/2), perselisihan sendiri muncul akibat adanya perubahan alokasi pimpinan diantara fraksi koalisi pendukung pemerintah, seperti yang telah disepakati sebelumnya Desember tahun lalu.

Sebelumnya lanjut dia, FPPP diberi jatah untuk menduduki kursi pimpinan Komisi I, IX dan BKSAP, persoalan muncul karena F-Hanura menolak menempatkan wakil mereka di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). dan F-Hanura sendiri lebih mengincar kursi pimpinan Komisi VI sebagai jatah FPDIP.

Bambang menambahkan sebenarnya FPDIP rela melepaskan kursi pimpinan di Komisi VI asalkan ditukar dengan kursi pimpinan Komisi I, mengingat FPDIP sendiri tidak mungkin

menempatkan dua kadernya sekaligus di BURT, karena FPDIP sendiri sudah menunjuk Eva Hartati di BURT.

Sebagai gantinya jelas Bambang, FPDIP kemudian menawarkan kader FPPP, Reni Marlinawati untuk mengisi kursi pimpinan Komisi VIII, namun Reni menolaknya, pasalnya Reni sendiri bersikukuh untuk tetap duduk sebagai pimpinan di Komisi X, dan hal ini kemudian menimbulkan penolakan dari FPDIP, karena FPDIP sendiri sudah memilih kadernya Utut Adianto untuk menduduki kursi pimpinan tersebut.

Persoalan kemudian bertambah, pasalnya kursi pimpinan Komisi VIII yang ditawarkan FPDIP kepada FPPP, ternyata sudah diduduki kader dari partai koalisi pendukung pemerintah lainnya, yakni Fathan dari FPKB.

Ironisnya, dengan lobi-lobi yang gencar, partai non koalisi pimpinan Prabowo berhasil mendudukkan Dimiyati Natakusumah, kader FPPP versi Muktamar Jakarta sebagai wakil pimpinan BURT, yang ditinggali F Hanura.

/Deddy K



DPR Dan Pemerintah Sepakati Terbentuknya Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui untuk membentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dituangkan dalam revisi UU No 1 Tahun 2015 yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).

Badan peradilan khusus ini ditargetkan dapat bekerja pada pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang.

“Pembentukan badan peradilan khusus diperlukan supaya penanganan sengketa lebih maksimal dan efisien,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamaruzaman di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Rambe menambahkan pembentukan badan peradilan khusus ini juga akan melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyiapkan aturan dan ketentuan teknis dalam tersebut.

Kedepan badan peradilan khusus ini tidak hanya menangani sengketa hasil pemilihan yang kini ditangani oleh MK.

Pasal 157 revisi UU Pilkada, antara lain menyebutkan :

1. Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.
3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus. /Deddy.K

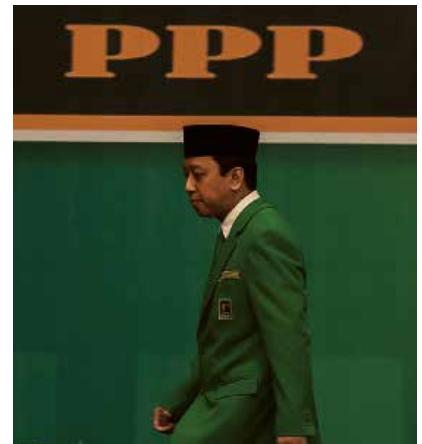
PPP Mulai Jaring Calon Kepala Daerah Awal Maret 2015

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar konsolidasi Nasional untuk menghadapi Pilkada serentak nasional di 271 daerah pada akhir tahun ini.

Demikian oleh Ketua Umum PPP, Romahurmuzy Munir pada pagelaran Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta, Kamis (19/2).

“Kami akan menggelar musyawarah wilayah, daerah hingga kabupaten dan kabupaten, kotahingga Oktober nanti,” jelas Romahurmuzy.

Hasil Mukernas lainnya kata Romahurmuzy, juga telah diputuskan penjaringan calon kepala daerah dilakukan secara terbuka sebulan penuh, dan akan dimulai pada tanggal 1 Maret mendatang. Selain itu



pihaknya juga akan membuat petunjuk pelaksanaan pilkada sesuai dengan acuan syarat dan pola koalisi dalam mengusung bakal calon kepala daerah.

/Deddy.K

DPR Berharap Pemerintah Turunkan Ongkos Naik Haji 2015



Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat menurunkan Ongkos Naik Haji 2015, mengingat harga bahan bakar pesawat sudah mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya.

Demikian seperti dikatakan oleh Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan di Komplek Parlemen, Senayan

Jakarta, Rabu pekan lalu.

“Selama ini biaya penerbangan cukup tinggi,” kata dia.

Saleh menambahkan pemerintah pada musim haji menyewa pesawat untuk jamaah untuk menunaikan ibadah haji.

Sementara kata Saleh, dalam pembayaran sewa dilakukan untuk rute pergi dan pulang. Padahal pesawat hanya penuh saat memberangkatkan jamaah, sedangkan usai mengantar jamaah, pesawat dalam keadaan kosong.

Proporsi biaya penerbangan mencapai 45 persen dari ongkos naik haji. Dari total biaya penerbangan sekitar 40 persen dianggarkan untuk pembelian avtur sebagai bahan bakar pesawat. 40 persen dipakai untuk sewa pesawat dan sisanya 20 persen untuk biaya lainnya.

Di tahun 2014, tarif pesawat untuk ongkos naik haji sebesar USD 2190, ditahun 2015 pemerintah sudah memprediksikan biaya sewa pesawat sebesar USD 2100-2200. /Deddy.K

Program Mobnas Tetap di Bawah Bayang-bayang Jepang

Kalau ada yang beranggapan program Mobil Nasional (Mobnas) dengan menggandeng pabrikan mobil asal Malaysia Proton merupakan awal kebangkitan nasional kita dalam bidang otomotif, sebaiknya jangan keburu optimis dulu. Karena kalau kita menelisik muasal program Mobnas Proton di Malaysia, ternyata masih sangat beraroma Jepang.

Bermula dari gagasan besar mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk mempercepat perkembangan industri otomotif Malaysia agar bisa mengimbangi negara-negara maju, maka pada 1983 berdirilah sebuah perusahaan *automobile* Proton. Yang sudah digagas Mahathir sejak 1979.

Tapi ya itu tadi, nampaknya Malaysia tetap saja dalam bayang-bayang Jepang.

Karena sejak tahap awal produksinya, menggandeng sebuah perusahaan teknologi Jepang, Mitsubishi. Yang kemudian pada Juli 1985, mobil keluaran proton pertama adalah sedan Saga.

Jepang memang sangat sensitif dalam mempertaruhkan kepentingan ekonomi-bisnisnya dalam bidang otomotif di Indonesia. Sehingga bukan saja Jepang, bahkan produsen-produk mobil dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, akan menghalangi secara halus niat Indonesia untuk membangun proyek Mobnas. Sarana yang ditempuh biasanya melalui Politik Luar Negeri, dengan

menggugat melalui World Trade Organization (WTO).

Itulah yang menimpa Indonesia pada 1998, hanya selang beberapa bulan menjelang kejatuhan Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO, memutuskan program Mobnas Timor Indonesia karena dianggap melanggar asas perdagangan bebas dunia.

Namun sebenarnya itu hanya dalih belaka. Intinya, karena pemerintahan Suharto lebih memilih Korea Selatan daripada Jepang. Presiden Suharto mengeluarkan kebijakan program Mobnas melalui Inpres Non 2 tahun 1996 mengenai Program Mobnas sebagai terobosan



The New Timor S515i

Viewed from any angle, the new Timor S515i is a marvel of aerodynamic excellence and beauty. Extensive wind tunnel testing has resulted in an impressively low coefficient of drag of 0.31, leaving a body shape that gives improved performance, handling and stability on the road. Complete with the new 1.5 litre DOHC Multi-Point fuel injected engine, other welcome benefits include improved fuel economy, a higher top speed and a quieter, safer and more comfortable ride.

Timor S515i

Apabila Mitsubishi memandangnya, Timor baru S515i tetap mencetuskan keyakinan akan budi aerodinamianya yang elegan dan menawan. Lewat serangkaian pengujian, Timor S515i terbukti mampu membukakan coefficient of drag (hambatan udara) hingga 0,31 yang membuatnya tampil mantap, stabil sekaligus gaya. Bebekal mesin baru DOHC Multi-Point, Timor S515i mampu menjawab tantangan melalui kecepatan tinggi, memberi kesenangan serta kenyamanan yang lebih namun irit bahan bakar.



Hutomo Mandala Putra.

Foto kiri: Iklan mobil Timor.

di sektor otomotif Indonesia.

Yang bikin masalah jadi semakin runyam bagi para produsen mobil Jepang adalah Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden No 42 tahun 1996 yang mengizinkan PT Timor Putra Nasional (TPN) mengimpor Mobnas yang kemudian diberi merk Mobil Timor (baik dalam bentuk jadi ataupun *Completely building-up*/ CBU dari Korea Selatan). Pertimbangannya, karena Mobnas belum bisa memproduksi di dalam negeri.

Atas dasar itulah maka prinsipal otomotif Jepang yang didukung oleh Uni Eropa, membawa masalah Mobnas Timor ke WTO. Indonesia, yang sejak 1995 bergabung dalam WTO sejak Januari 1995, dianggap harus mematuhi asas perdagangan bebas internasional. Agaknya, Jepang berhasil menggagalkan proyek Mobnas Timor melalui sarana politik luar negeri.

WTO kemudian memutuskan Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan perdagangan internasional terkait adanya perlakuan khusus impor mobil dari KIA Motors Korea Selatan,

yang hanya memberi keuntungan pada satu negara, seperti misalnya perlakuan bebas tarif masuk barang impor.

Kedua, Indonesia dianggap telah melanggar dengan memberikan perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobil nasional selama 2 tahun, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah TPN milik Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Suharto.

Terlepas dari niat baik pemerintahan Suharto untuk membangkitkan dan mengembangkan industri otomotif Indonesia, namun kebijakan proteksi program Mobnas yang beraroma KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pada perkembangannya menjadi bumerang, yang kemudian bukan saja menggagalkan proyek ambisius tersebut, bahkan juga menjadi salah satu momentum kejatuhan Suharto.

Pada 1996, sebenarnya gagasan membangun program Mobnas bukan semata-mata berasal dari Hutomo Mandala Putra dan TPN. BJ Habibie, yang ketika itu masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi, sempat menggagas ide melahirkan Mobnas yang diberi nama Maleo. Sayangnya, Suharto lebih memilih pola KKN dalam menjabarkan

kebijakan proteksi nasional terkait Mobnas. Sehingga lebih memilih perusahaan anaknya, PT TPN untuk mengembangkan Mobnas. Dengan fasilitas antara lain pembebasan bea masuk untuk impor mobil KIA Sephia, produksi KIA Motors Corp, Korea Selatan, yang kemudian dijadikan Mobnas Timor.

Di sinilah beberapa perusahaan dan produsen otomotif Jepang di Indonesia mulai gelisah dengan munculnya Korea Selatan sebagai “kekuatan baru” dalam bidang otomotif. Begitupun, untuk menghadapi sikap keras Suharto terkait kebijakan proteksi proyek Mobnas Timor, beberapa perusahaan otomotif Jepang masih mencoba mencari kompromi dengan Suharto. Dengan mengajukan rencana untuk membuat Mobnas versi mereka sendiri.

Namun Suharto, selain bersikukuh menggunakan skema *joint venture* dengan Korea Selatan, juga tetap bersikeras memberikan proteksi fasilitas untuk TPN milik Hutomo Mandala Putra.

Begitulah. Meski dalam konteks politik internasional Korea Selatan sama-sama merupakan sekutu strategis bersama dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin, namun untuk urusan otomotif, Jepang ingin tetap menjadi “Pemain Kunci” satu-satunya di Indonesia.

Betapa tidak. Dalam beberapa sesi di sidang WTO, ditegaskan bahwa jika ingin membuat Mobnas, maka harus menggunakan suku cadang diproduksi Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Tanpa melibatkan negara-negara adidaya ekonomi tersebut dalam penggunaan suku cadang, maka program Mobnas bisa dipastikan tidak akan lolos Seritifikasi WTO.

Intinya, Jepang merasa terancam akan tergerus pangsa pasarnya di Indonesia, jika pemerintah berencana memproduksi Mobnas di bawah 1000 cc. Artinya, Jepang akan cemas jika Mobnas kita akan bermain di segmen 1000 cc ke atas. ■

Hendrajit

Meskipun kejatuhan Presiden Sukarno pada 1967 tidak lepas dari bantuan secara terbuka maupun tertutup dari Amerika Serikat dan Inggris, dalam kebijakan ekonomi Indonesia, pemerintahan Suharto justru banyak menerapkan model Jepang. Berikut jaringan politiknya.

Alhasil, hubungan Indonesia-Jepang justru semakin mesra, terutama dalam mengembangkan industri-industri strategis, terutama otomotif. Salah satu pemain kunci yang mengatur hubungan bilateral Indonesia-Jepang melalui saluran informal adalah Soedjono Hoemardhani. Masuk akal, karena selain merupakan orang dekat Suharto sebagai asisten pribadi Suharto di awal masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru, Hoemardhani juga merupakan perwira angkatan darat yang pernah dilatih oleh Keibodan. Keibodan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda usia 23 – 25 tahun.

Tidak salah Suharto memilih Soedjono sebagai the *Japanese Lobby*. Dialah yang berhasil melobi Toyota agar bersedia menanamkan modal di Indonesia pada 12 April 1971. Sebelumnya, dia berhasil merayu perusahaan mobil itu buat mengizinkan PT Astra International Incorporated menjadi distributor mobil Jepang di Tanah Air.

Pada paruh kedua fase hubungan bilateral Indonesia-Jepang, Suharto punya pemain kunci baru dalam hubungan kedua negara. Ginandjar Kartasasmita. Di era ketika Ginandjar merupakan pemain penting dan strategis di sekretariat negara di bawah Mensesneg Sudharmono, salah satu lini industri yang kemudian menggurita adalah sektor otomotif.

Selain menikmati kebijakan deregulasi ekonomi, Jepang juga diuntungkan melalui pemberian insentif bagi PT Astra dalam mengembangkan usahanya. Misalnya melalui SK Menteri Perindustrian No. 168/M/SK/9/79, pemerintahan



Otomotif, Mahar Perkawinan Politik **Indonesia-Jepang**

Suharto memberikan keringanan pajak pada kendaraan minibus. Anehnya, keringanan pajak tidak diberikan pada sedan. Padahal sedan diproduksi pabrikan Eropa, sedangkan kendaraan minibus saat

itu rata-rata dibuat perusahaan Jepang. Jelas dalam sektor otomotif, Jepang diberi hak istimewa.

Dan ini berlanjut terus pada dekade 1990-an. Paket kebijakan otomotif yang dikeluarkan pada 1993



Pekerja memeriksa mesin mobil sebelum di pasarkan di sebuah pabrik mobil di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/2).

praktis juga membuka jalan bagi Jepang untuk mendominasi Toyota Kijang, kendaraan sejuta umat pada masa kejayaannya. Sebab, saat itu, Toyota dapat keringan pajak karena berhasil menciptakan kandungan lokal dalam proses produksi mobil tersebut mencapai 47 persen.

Singkat cerita, gara-gara payung kebijakan perekonomian pemerintahan Suharto, Jepang praktis berhasil mencengkram

pangsa pasar otomotif Indonesia. Menurut data yang pernah dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), kendaraan bermotor merek Jepang menguasai 96 persen pasar mobil nasional.

Bukan itu saja. Menurut data pada 2012, Toyota menguasai pasar otomotif sepanjang dengan penjualan 370.987 unit, disusul Daihatsu sebesar 150.183 unit, lantas Mitsubishi 138.778 unit.

Jepang Instrumen Garis Depan Skema TPP

Lepas dari merajalelanya Jepang dalam sektor otomotif di Indonesia, pengaruh negeri matahari terbit ini sebagai negara adidaya ekonomi di Asia Pasifik, kiranya perlu diantisipasi oleh para “pemangku kepentingan” perekonomian nasional kita.

Manuver Amerika Serikat untuk menggalang kekuatan politik di forum regional Asia Pasifik harus kita cermati bersama karena dalam jangka panjang akan memperlemah blok ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Hal ini semakin nyata ketika Amerika Serikat dan Jepang sejak akhir Februari 2013 lalu bersepakat untuk menindak-lanjuti penggalangan kekuatan negara-negara Asia Pasifik melalui blok perdagangan yang dirancang oleh Amerika Trans Pacific Partnership (TPP). Tujuannya, untuk memecah-belah kekompakan negara-negara anggota APEC.

Pada tataran ini, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara pada umumnya, harus memandang tren ini secara cermat dan penuh perhitungan. Karena di balik gagasan TPP untuk menggalang dukungan dari negara-negara Asia Pasifik, sasaran sesungguhnya adalah untuk membendung pengaruh dan kekuatan Cina sebagai negara adidaya baru di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada khususnya.

TPP atau kemitraan lintas negara-negara Asia Pasifik saat ini merupakan ancaman nasional bagi Indonesia, mengingat fakta bahwa TPP merupakan alat dari 600 korporasi global Amerika Serikat untuk menjajah perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi skema ini, Jepang dan Australia merupakan unsur garis depan yang secara langsung harus dihadapi Indonesia. Khususnya di matra ekonomi dan bisnis. ■

Hendrajit



Mobil Nasional atau Taksi Nasional

Impian membangun kembali Mobil Nasional lewat Proton agaknya jauh panggang dari api. Pasaunya produsen mobil asal Malaysia itu lebih dekat dengan dunia pertaksian tanah air dibanding dengan rencana pembangunan mobil nasional.

Taksi Putra atau yang dahulu dikenal dengan nama Taksi Citra adalah perusahaan taksi yang pertamakali menggunakan mobil produksi Proton untuk memperkuat armada taksi yang dimilikinya.

Berawal pada tahun 1994, bertempat di Lantai Dasar Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* imbal beli Pesawat CN 235 (versi Militer) dengan mobil produksi Malaysia antara Menristek BJ Habibie dengan putri tertua Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau yang akrab disapa Mba Tutut.

Pada nota kesepahaman tersebut

disepakati jika PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) menjual pesawat CN 235 kepada Malaysia. Sebagai kompensasinya, Proton dapat masuk ke Indonesia melalui perusahaan taksi yang dimiliki Mba Tutut, Citra. Dengan nilai imbal yang cukup besar USD100 juta, dengan mulusnya ke 2500 Proton masuk ke Indonesia dengan bentuk *completely built up* utuh selain itu ada keistimewaan lain yang diberikan kepada Proton, yakni bebas bea masuk.

Ada beberapa model mobil Proton yang populer dan dipergunakan sebagai armada taksi di Indonesia yakni, Saga, Wira, Persona. Bahkan pada bulan April 2014, Proton kembali memperkenalkan Saga FLXLL (*low line*) sebagai armada taksi terbaru. Kehadirannya melengkapi Saga FLX yang sudah menjadi taksi lebih dulu.

Proton Saga FLXLL (*low line*) disokong mesin 1.3 liter 4 silinder DOHC Campro IAFM. Harga Saga

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad (kelima kiri) melihat prototipe mobil Proton Iriz di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Proton, Shah Alam, Selangor, Malaysia, Jumat (6/2).

Foto kanan: Sejumlah taksi menunggu penumpang di kawasan bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (11/6).

FLXLL dibanderol Rp 105 juta *off the road* sudah termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) khusus diperuntukkan taksi.

Mungkinkah hubungan mesra antara Proton dan perusahaan taksi tanah air akan terus berlangsung langgeng dengan adanya kesepakatan antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobil nasional (mobnas)? Dimana pada kesempatan itu, penandatanganan *MoU* tersebut langsung disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana

Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015).

Tentu saja, kehadiran Jokowi pada acara tersebut mengindikasikan dukungan pengembangan mobnas Indonesia dengan melibatkan pihak Proton. Pada periode 2007 hingga 2013, Proton telah berhasil menjual produknya di tanah air sebanyak 12.065 ribu unit.

Peta Bisnis Pertaksian Tanah AIR

Blue Bird Grup hingga kini masih merajai bisnis pertaksian tanah air, karena kepiawaiannya menguasai pangsa pasar sebanyak 33%. Berdasarkan data yang diperoleh Majalah Aktual di medio Oktober 2014 saja, disebutkan armada yang dimiliki Blue Bird Grup sebanyak 30.298 unit, 23.932 di antaranya adalah taksi jenis reguler yang beroperasi di 13 lokasi di Indonesia, terutama kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Bali. Tidak hanya sebatas itu saja, ada 7.504 tambahan izin lisensi taksi di seluruh Indonesia.

Bicara soal pendapatan, Blue Bird Grup juga berhasil membukukan pendapatan bersih perusahaan pada 30 April 2014 sebesar Rp 1.477 miliar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.122 miliar. Sedangkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau *annual growth rate* (CAGR) yang berhasil diraih Blue Bird Grup sebesar 23,7% dalam tiga tahun terakhir dari Rp 2.564 miliar menjadi Rp 3.921 miliar. Aktivitas usaha taksi reguler Blue Bird Grup berkontribusi sebesar 79,5% dan 81,0% dari total pendapatan bersih dari Blue Bird Grup sendiri.

Di sisi lain, Blue Bird Grup lebih mempercayakan kepada produsen merek mobil terkenal sebagai pemasok utama kendaraan yang dipergunakan untuk memperkuat armada taksi yang dimiliki, seperti PT Astra International Tbk, Mercedes Benz Indonesia dan PT Nissan Motor Distributor Indonesia.

Sedangkan untuk model kendaraan yang populer sebagai armada taksinya seperti Toyota

Limo, pesanan umumnya dilakukan 12 bulan di muka. Di Maret 2014, Blue Bird Grup sendiri telah memesan 1.899 Toyota Limo dari Astra International. Per 30 April 2014, dan sekitar 475 kendaraan dari pesanan ini telah dikirimkan.

Pada bulan September 2013, perseroan juga melakukan pemesanan yang sama pada 500 Nissan Almera sebagai model terbaru dari armada taksi reguler Blue Bird Grup. Setelah itu, pada bulan April 2014, Perseroan kembali memesan 500 Nissan Almera. Per 30 April 2014, sekitar 500 kendaraan dari pesanan ini telah dikirimkan.

Sedangkan peringkat kedua ditempati, PT Express Transindo Utama Tbk atau yang lebih dikenal dengan sebutan Taksi Express. Perusahaan ini berhasil mencatatkan pendapatannya pada kuartal III 2014 sebesar Rp 640,15 miliar. Pencapaian ini meningkat sebesar 26 persen dari perolehan tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni senilai Rp 506,29 miliar.

Dengan demikian, perusahaan operator Taksi Express tersebut berhasil mendulang laba bersih yang mengalami kenaikan sebesar 15 persen menjadi Rp 109,25 miliar.

Pencapaian yang berhasil diraih di kuartal III 2014 ini ditopang oleh berjalannya strategi ekspansi bisnis Express Group seperti yang sudah direncanakan di awal tahun. Begitu juga pada kuartal IV tahun 2014 dengan melakukan inovasi bagi kepuasan konsumen, salah satunya dengan merambah ke ranah digital.

Sepanjang 2014, Express Group telah mengambil beberapa langkah strategis yang berhasil meningkatkan posisi pasar, di antaranya dengan menambah jumlah armada taksi



reguler di berbagai daerah operasi seperti Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Medan Padang, Semarang, Surabaya dan Lombok.

Selain itu, Express Group juga melakukan ekspansi di lini bisnis taksi premium dan bus pariwisata untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen.

Tak beda dengan pesaingnya, Express Grup juga lebih mempercayakan kepada produsen mobil buatan Jepang, dan Eropa untuk memperkuat armadanya, baik untuk layanan reguler dan layanan eksklusif.

Dalam 11 bulan 2013, penjualan taksi berupa sedan mencapai 13.018 unit atau rata-rata 1.183 unit setiap bulan. Berdasarkan data penjualan dari anggota GAIKINDO, produsen yang menyediakan produknya untuk taksi tahun lalu adalah Toyota (Limo atau Vios, Etios dan Mark X), Kia (Cerato), Proton (Wira), Nissan (Almera), Hyundai (Excel III) dan Chevrolet (Kalos dan Lova).

Mobil asal Jepang tetap mendominasi. Selama 2013, Toyota berhasil menjual Etios sedan 2.194 unit kepada beberapa taksi di Indonesia. Sedangkan Limo atau kembaran dari Vios, mencapai 9.431 unit atau memperoleh 73 persen. Kalau digabungkan perusahaan taksi yang menggunakan produk Toyota mencapai 90 persen. Sisanya dibagi oleh Nissan, Kia, Chevrolet dan Hyundai. Dominasi ini yang agaknya dibidik oleh Proton. ■

Deddy K

Berhayal Mobnas Dari Mobil-Mobilan

Kerjasama pengembangan industri mobil nasional antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan Malaysia, Proton Holdings Bhd mendapat cibiran dari berbagai kalangan. Rencana bisnis Hendropriyono pun layu sebelum berkembang.

PT Adiperkasa Citra Lestari mendadak disorot publik setelah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono memakai nama perusahaan itu dalam kerjasama otomotif dengan perusahaan Malaysia Proton Holdings Bhd. Melalui kerjasama ini, Hendropriyono bermimpi menghidupkan kembali mobil nasional (mobnas) yang sudah lama terkubur.

Aktual.co menangkap kejanggalan saat menelusuri alamat PT Adiperkasa Citra Lestari di kompleks pertokoan Darmawangsa Square Nomor 18, Jl Darmawangsa VI, Jakarta Selatan. Alamat ini ternyata ditempati kantor pengacara dan disewakan untuk beberapa kantor. Aktivitas di kantor ini pun tidak menunjukkan adanya kesibukan para pekerja.

Adapun database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM mencatat, PT Adiperkasa Citra Lestari didirikan pada 22 Februari 2012 dan mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan pada 22 Juli 2013. Perusahaan ini beralamat di Komplek Rukan Tende Square 26, Jalan Wolter Monginsidi 122-124, Jakarta Selatan. Namun ketika ditelusuri, lagi-lagi ditemukan keanehan lantaran kantor tersebut adalah ruko yang dipakai Notaris & PPAT Muhammad Hanafi, SH.

Ketidakjelasan alamat dan keberadaan PT Adiperkasa Citra Lestari ini menjadi bagian suram dari upaya pengembangan mobil nasional (Mobnas) yang digadang-

gadang Hendropriyono. Sosok yang diketahui ikut pontang-panting memenangkan Joko Widodo saat Pilpres 2014 ini juga antusias ketika menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah. Penandatanganan ini tergolong prestisius karena dihadiri Presiden Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, bos Proton Mahathir Mohamad, serta duta besar kedua negara.

Tak disangka-sangka, kabar tentang kerjasama pengembangan mobnas dengan Proton banjir kritik di dalam negeri. Salah satunya dari Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang menyebut kerjasama mobnas dengan Proton adalah sikap konyol pemerintah Jokowi. Tommy





Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers di Bangunan Perdana Putra, Putrajaya, Jumat (6/2).

Karyawan Proton Holdings Bhd memeriksa sebuah mobil Saga di pabrik perusahaan di Shah Alam, Selangor, Malaysia.

memang berkompeten mengkritik karena dialah perintis mobil nasional ketika Presiden Soeharto masih berjaya.

Melalui akun Twitternya @TommySoeharto62, putra mantan Presiden Soeharto itu beberapa kali membuat plesetan istilah, seperti MOBNAS = Modal Bohong Nasional, TIMOR = Tinggi Pamor, ESEMKA = entah sekarang ke mana. Tommy juga nyeletuk mengusulkan agar

logo mobil nasional yang ingin dikembangkan Jokowi dengan MKN sebagai singkatan dari Mobil Kayu Nasional. "Kalau serius untuk Mobnas berkualitas, kenapa tidak gandeng Jepang, Korea, atau Eropa. Untuk gebrakan tidak perlu tanggung-tanggung," celetuk Tommy.

Tak cukup sampai disitu, Tommy mencibir mobil ESEMKA yang pernah digembar-gemborkan Jokowi sebagai sebuah kebohongan jika akhirnya Proton ditunjuk untuk mengembangkan mobil nasional. "Sebaiknya jangan diberi nama Mobnas jika masih dikelola negara lain," tandas Tommy.

"Yang harus di pikirkan saat ini bagaimana mengatasi jalan yang remuk di mana-mana, bukan saatnya

memikirkan Mobnas milik negara lain."

Kalangan DPR tak mau ketinggalan mencibir kerjasama mobnas dengan Proton. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berceletoh, jangan-jangan mobnas ini kemudian berubah menjadi mobmas alias mobil Malaysia. Karena itu, pria yang akrab disapa tuan Takur ini curiga bahwa Jokowi hanya mengikuti keinginan orang tertentu sehingga bersedia mendukung kerjasama mobnas dengan Proton asal Malaysia.

"Apa iya Presiden Jokowi benar-benar melupakan mobil Esemka. Saya tidak begitu yakin apakah hanya dorongan orang tertentu atau mengabaikan yang ada," ucapnya.

Anggota DPR Dodi Alex Nurdin juga mempersoalkan penanda MoU dengan Proton Malaysia jika sifatnya Government to Government (G to G). Pemerintah pun tidak boleh bersikap diskriminatif jika kerjasama ini bersipat Business to Business (B to B). "Kalau B to B atau murni kerjasama swasta, ya pemerintah jangan memberi perbedaan perlakuan dengan pihak lain," kata putra gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu.

Hujan kritik yang semakin deras akhirnya direspon Hendropriyono. Kepada media, dia mengatakan bahwa kerjasama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton merupakan bisnis pihak swasta atau B to B. Kerjasama ini juga bukan mobil nasional dan menitikberatkan pada riset, pengembangan, serta teknik. "Kerja sama ini sifatnya B to B. Kami swasta, Proton juga kini swasta," tukas Hendropriyono.

Hingga kini, belum jelas bagaimana nasib kerjasama industri otomotif yang sempat mengharmoniskan hubungan kepala Negara Indonesia dengan Malaysia itu. Disisi lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa rakyat Indonesia memiliki emosi perlawanan tinggi jika berhadapan dengan negeri jiran Malaysia. ■

Moh Sahlan

Penyertaan Modal Negara ke BUMN Tak Ada Deal dengan DPR

Langkah Presiden Joko Widodo pada awal jabatannya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memberikan ruang fiskal pada APBNP Tahun Anggaran 2015. Salah satu alternatif yang dilakukan pemerintahan Jokowi yaitu menambah modal Negara pada perusahaan milik Negara atau dikenal dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di perusahaan BUMN.

Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan telaah dan kajian menyeluruh terkait efisiensi, efektifitas, transparansi untuk mencegah penyalahgunaan uang rakyat. Komisi VI DPR RI hanya menyetujui suntikan modal ke BUMN sebagian saja, yaitu sebesar Rp36,076 Triliun ditambah Rp1,2 Triliun (*non cash*) dari usulan yang diajukan semula oleh Pemerintah untuk 35 BUMN sebesar Rp48 Triliun. Beberapa BUMN tidak disetujui untuk mendapatkan PMN seperti PT RNI, Bank Mandiri & PT Djakarta Lloyd. Selain itu, ada beberapa BUMN yang usulan PMN tak dapat dipenuhi seluruhnya.

Pekan lalu wartawan Aktual Ismed Eka dan Mohammad Sahlan berbincang dengan Ketua Komisi VI Hafiz Thohir di DPR RI, khusus membahas masalah ini. Berikut petikan wawancaranya:

Awalnya Anda bersikeras menentang PMN ke beberapa BUMN terkait efisiensi, efektif dan transparansi. Hingga pada akhirnya Panja Komisi VI bersama DPR melakukan rapat tertutup menyetujui PMN ke 35 perusahaan di bawah BUMN. Bagaimana menurut Anda?

Pada rapat tertutup penetapan PMN kita lakukan atas permintaan dari pemerintah, Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini kita lakukan karena DPR dan Pemerintah ingin membahas rahasia-rahasia yang ada dibalik perusahaan BUMN tersebut. Seperti contoh, jika rencana pengembangan Perusahaan BUMN tersebut dibuka ke publik, dikhawatirkan adalah penurunan saham di Bursa Efek Indonesia.

Apa dasarnya?

Rencana pengembangan perusahaan BUMN ini bersifat rahasia Negara, tidak bagus kalau

rencana tersebut diketahui oleh perusahaan lain. Ada undang-undangnya, mereka berlindung di situ. Sedangkan yang bersifat terbuka, kita beberkan ke publik apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR.

Apa yang menjadi alasan PMN disetujui atau ditolak?

Pertama, PMN pada BUMN memiliki resistensi yang tinggi sehingga DPR menegaskan kembali kepada perusahaan BUMN terkait kemampuannya mengelola dana PMN. Kedua, terkait kesiapan Menteri BUMN Rini Soemarno menanggung segala resiko yang terjadi terkait PMN. Setelah berdebat panjang, Menteri Rini bersikeras untuk tetap melakukan PMN di BUMN. Semetara pemerintah mempunyai ruang fiskal dan keinginan membangun infrastruktur dengan melibatkan perusahaan BUMN.

Kenapa harus perusahaan



10 Keputusan yang mengikat antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI terkait usulan PMN RAPBN-P TA 2015:

1. Merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI terhadap 14 BUMN yang bermasalah.
2. Merekomendasikan Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN dalam memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. PMN tidak boleh digunakan untuk membayar utang perusahaan penerima PMN.
4. Pelaksanaan right issue tidak mengurangi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait.
5. Penggunaan PMN dilakukan & dicatat dalam rekening terpisah.
6. BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
7. Perlu Pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan.
8. Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN BUMN secara terus menerus.
9. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, dana PMN agar mengutamakan produk dalam negeri & sinergi BUMN.
10. Dalam melaksanakan PMN, Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti yang telah disampaikan dalam Raker Komisi VI dengan Meneg BUMN yang membahas persetujuan PMN sebagaimana terlampir.

BUMN?

Pemerintah memiliki anggaran ruang fiskal yang harus diolah, selain itu pemerintah juga ingin melibatkan perusahaan BUMN menjadi agen pembangunan infrastruktur. Kalau tidak ke perusahaan BUMN kemana lagi. BUMN ini kan perusahaan plat merah, punya rakyat artinya kalau tidak memberdayakan perusahaan milik rakyat dengan uang rakyat tentu DPR mendukung langkah tersebut.

Dalam memutuskan perusahaan BUMN yang mendapat PMN, hal terberat apa yang menjadi pertimbangan Panja?

Komisi VI membuat pilihan PMN berdasarkan semua pandangan fraksi yang ada. Dalam persoalan krisis DPR melakukan *voting*, lima lawan lima. Bahkan keberatan tersebut kita sampaikan ke menteri Rini Soemarno, namun akhirnya menteri Rini tetap bersikeras untuk melanjutkan PMN. Seperti PMN di Krakatau

Steel (KS) dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). KS beralasan mereka terus merugi selama tiga tahun terakhir padahal perusahaan swasta sejenis tidak menerus mengalami kerugian.

Apakah ada deal-deal tertentu untuk meloloskan PMN di Perusahaan BUMN?

Demi Allah, tidak ada. Bahkan ketika rapat dengan menteri BUMN dan perusahaan semua pembicaraan kita rekam. DPR juga memiliki dokumen khusus terkait rencana PMN perusahaan BUMN, namun hal itu bersifat rahasia. Kalau terjadi sesuatu, BPK bisa berpijak pada dokumen yang kita miliki.

Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa PMN kalau tidak diberikan kepada BUMN, lalu kepada siapa lagi kita percayakan uang rakyat. Selama ini kita tidak punya bukti bahwa PMN merugikan Negara, maka PMN kali ini dengan catatan jika BUMN tidak memberikan hasil signifikan akan berdampak pada PMN selanjutnya.

Kalau PMN tidak diberikan kepada BUMN, sama saja nanti pada akhirnya akan diberikan ke kementerian-kementerian yang justru meningkatkan potensi korupsi, seperti kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian perhubungan, polri, dan seterusnya.

Maka dari itu kita beri satu tahun ini kita beri kesempatan, tiap tiga bulan kita akan cek laporan mereka. Misalnya, Hutama Karya bangun tiga jalan tol, kita berikan Rp3,5 triliun, mana progres pembangunan yang dilakukan, berapa keuntungan yang didapatkan. Tapi kalau ini diberikan ke kementerian, dana tersebut bisa *mlempem*.

Bagaimana keuntungan BUMN infrastruktur yang hanya mencapai 3 persen?

Jangan melihat keuntungan dalam hal keuangan saja, namun lihat juga multiplier efek yang dihasilkan. Memang perusahaan BUMN Infrastruktur untungnya sedikit. Namun lihat juga efek dari pembangunan infrastruktur secara makro. Contohnya tol Sukabumi, kalau diserahkan ke swasta, sampai saat ini belum selesai juga terbangun. Maka dari itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur. Kalau gagal membangun, Bullshit target pembangunan tercapai.

Kenapa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas PMN?

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 33, bahwa Negara berkewajiban meningkatkan ekonomi dan hajat orang banyak maka pembangunan infrastruktur. Misalnya, pembangunan jalan tol, kalau pemerintah tidak bertindak, siapa lagi yang mau membangun jalan tol dengan keuntungan sedikit. Termasuk monorail, jika diserahkan ke swasta pasti tidak akan dapat terbangun, potong leher saya!

Kenapa tujuan PMN diberikan kepada BUMN?

Karena kita tahu dalam pemerintahan sebelumnya, kementerian yang paling korup itu kementerian PU, kementerian perhubungan, Polri dst. Saat ini, ada anggaran Rp70 triliun yang dikelola kemenpupera. Itu korupsinya lebih tinggi, berkisar 6-8 persen dari anggaran proyek. Nah dengan PMN di BUMN, kita akan adu, mana yang lebih efisien. Dana yang ada di kementerian atau PMN di BUMN. Jika PMN di BUMN tidak efektif dan efisien, ke depannya kita tak akan berikan lagi kesempatan. Apakah anda tahu, Petronas Malaysia menyumbang 40 persen APBN negaranya?.

Apakah DPR dapat uang dari Proyek BUMN?

Tidak, kita tidak mendapat duit *kok* dari situ. Kalau BUMN bermasalah, ya kita hentikan. Gak ada kepentingan apa-apa. Kami Cuma ingin mengejar target pembangunan itu.

Bagaimana dengan rekomendasi BPK terhadap 14 BUMN?

Kita berikan waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan terhadap rekomendasi BPK. Temuan-temuan lain, misalkan *moral hazard*. Walaupun BOD-nya teman kita, tetap kita minta untuk diubah, diganti jajaran direksi jika ingin mendapatkan PMN dari pemerintah. Bahkan saat ini, ada lima atau 6 BUMN harus mengganti jajaran BOD. Ini kita lakukan untuk menghindari pencurian-pencurian uang rakyat melalui BOD yang lama. Mereka kecewa, tapi biarin aja, kita menyelamatkan BUMN nya, bukan orang-orangnya.

Bagaimana dengan jatah penguasa yang menanamkan orangnya lewat jajaran direksi atau komisaris BUMN?

itu betul. Dahulu memang dilakukan seperti itu. Tapi sekarang

tidak ada titip-titipan seperti itu.

Bagaimana sanksi jika target tidak tercapai?

Sanksi yang diberikan oleh DPR bersifat politis karena DPR tidak bisa mengganti Menteri. Yang menghakimi adalah masyarakat dan media. Misalkan, menteri Rini *omdo* terkait program kerja PMN.

PMN akan mengulang bailout century ke II?

Ini berbeda, PMN tidak boleh untuk bayar utang dan diberikan kepada perusahaan milik negara. Sedangkan Century itu milik swasta dan untuk membayar utang. Jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi tsunami ekonomi.

Apa sanksi kepada menteri BUMN jika PMN disalahgunakan?

Secara moril menteri Rini harus ikut bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan PMN di perusahaan BUMN. Hal tersebut menjadi konsekuensi karena perusahaan tersebut di bawah kendalanya. Menteri Rini yang menunjuk dan mengangkat jajaran direksi dan BOD perusahaan BUMN.

Terkait PMN di Jakarta Lyod, Panja tidak menyetujui, namun mengapa banggar malah meloloskannya?

Banggar ini melakukan evaluasi tidak melalui panja, sedangkan kita melalui proses yang panjang. Syarat untuk menerima PMN adalah pemerintah memiliki saham mayoritas di BUMN tersebut. Dalam kasus Djakarta lyod, pemerintah hanya memiliki 29 persen. Itu tidak memenuhi UU BUMN. Kalau kasus terbuka, kita *win-win solution*. Kekuatan *nomenclature* MD3 itu ada di Komisi VI, jika terjadi sesuatu di masa depan, maka resiko akan lebih besar. Apa bedanya dengan memberikan dana PMN ke swasta.

Bagaimana tanggapan adanya isue PMN diambil tiga

persen untuk keuntungan partai?

Tiga persen dari PMN itu sekitar satu triliun. Saya tidak terpikir untuk mengambil keuntungan sebesar itu dari PMN, berat itu. Ketika ditawarkan pun saya tidak berani mengambil keuntungan dari pekerjaan proyek. Karena ini kan prosesnya berjalan secara transparan sekali, semua orang ikut mengawasi jalannya keuangan Negara, begitu ada kita menerima duit dari PMN, dia (BUMN) *ngoceh*, gawatlah kita. Namun bisa jadi mereka menerima lewat BOD, *nah* itu tugas kalian untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran PMN.

Bagaimana solusi dari DPR?

Kita tahu bahwa direksi BUMN banyak yang nakal-nakal sehingga perlu diawasi dengan ketat. Beberapa langkah kita lakukan, mulai dari mengganti direksi hingga melakukan panja pengawasan. Jadi semakin ke depan, ruang bermain semakin sempit. Kasus century merupakan contoh kasus. Biarkan bola ini bergulir, kalau ada apa-apa tinggal ciduk aja orang-orang yang terlibat korupsi. Kalau jajaran direksi tidak mau transparan, ganti saja meskipun itu orang-orangnya menteri Rini Soemarno. Biasalah, penguasa yang memiliki orang-orangnya di jajaran direksi seperti layaknya punya kerajaan sendiri.

Hambatan, tantangan dan harapan PMN di BUMN?

Tantangannya yaitu PMN ini hal yang besar sehingga merupakan momen yang kita tunggu, apakah merubah suatu kebiasaan BUMN yang biasanya di teteki ataukah seperti Petronas yang mampu menyokong hingga 40 persen APBN. Harapan kita bisa meningkatkan manfaat kepada masyarakat 3 hingga 4 kali lipat, asal jangan merugi. Namun mereka (BUMN) berlingkungan dari masalah klasik masa lalu, seperti kurangnya modal, masalah pembebasan lahan hingga kurangnya koordinasi antar BUMN. ■

BTN Turunkan Suku Bunga KPR



PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menurunkan suku bunga kredit perumahan rakyat (KPR) sekitar 75 hingga 200 basis poin. Diilhami kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan BI Rate dari 7,75 persen menjadi 7,5 persen.

Kebijakan ini disampaikan Direktur Utama BTN Maryono kepada para wartawan di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta akhir Februari 2015. "Setelah penurunan BI rate, kita pun sudah menurunkan (suku bunga) KPR-KPR lama," ujarnya.

Maryono menjelaskan, bunga yang akan diturunkan BTN adalah bunga untuk program subsidi yang menganut model *ballooning*. Model kredit ini menjadikan bunga yang harus dibayarkan semakin lama semakin tinggi. "Bunga yang makin tinggi dalam model *ballooning* inilah yang kita turunkan bunganya maksimal sampai 200 basis poin," tandasnya.

Lebih gamblang tentang kebijakan ini disampaikan Direktur BTN Mansyur S Nasution. Suku bunga KPR untuk rumah non-subsidi diturunkan sekitar 0,75 persen tergantung dengan segmen rumah yang dipilih nasabah. Sedangkan suku bunga rumah subsidi non Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diturunkan hingga 2 persen atau 200 basis poin. Hanya suku bunga kredit rumah FLPP yang masih tetap di angka 7,25 persen.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp 5,1 triliun dalam APBN 2015 untuk kredit perumahan model FLPP. Anggaran FLPP tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan 65.000 unit rumah yang tersebar di sejumlah daerah./ismed eka

Investasi Luar Jawa Masih Kalah Dari Jawa



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi di luar Pulau Jawa tahun 2015 menembus angka Rp237 triliun. Masih kalah dibanding investasi di Pulau Jawa yang ditarget Rp282,6 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, kalkulasi investasi di luar Pulau Jawa meliputi proyek investasi di Sumatera sebesar Rp75,2 triliun, Kalimantan (Rp74,5 triliun), Sulawesi (Rp27,8 triliun), Bali dan Nusa Tenggara (Rp19 triliun), Maluku (Rp7,3) serta Papua dan Papua Barat (Rp33,2 triliun).

"Luar Jawa diharapkan ada investasi yang memberi nilai tambah, seperti industri substitusi impor, industri hilir sektor pertanian (perkebunan dan peternakan), industri hilir perikanan serta industri hilir pertambangan," ujar Franky saat

rapat koordinasi bidang penanaman modal bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal di Jakarta, Senin (23/2).

Khusus untuk Papua dan Papua Barat, fokus investasinya akan diarahkan pada sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Selain itu juga tetap harus mengembangkan sektor pertambangan dan pengolahan hasil tambang, termasuk investasi untuk industri kimia.

Lantas, bagaimana dengan Pulau Jawa? Franky menjelaskan bahwa tahun ini ditarget mencapai Rp282,6 triliun. Fokus investasi di Jawa akan diarahkan pada sektor industri padat karya, jasa, dan perdagangan. Secara keseluruhan, lanjut Franky, realisasi investasi 2015 dipatok Rp519,5 triliun. Terdiri atas Rp88,4 triliun dari sektor primer, Rp267,5 triliun dari sektor sekunder, serta Rp163,6 triliun dari sektor tersier.

BPKM sendiri mengklaim proyeksi investasi tersebut dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen tahun ini. Adapun hingga 2019 realisasi investasi diharap bisa mencapai Rp3.500 triliun, dua kali lipat dari realisasi investasi pada 2010-2014 sebesar Rp1.632,8 triliun./ismed Eka



Prospek Industri Konstruksi Makin Kinclong



Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) menilai prospek industri jasa konstruksi semakin cerah, menyusul kebijakan pemerintah yang akan menggenjot

proyek infrastruktur.

Ketua Umum DPP Gapeksindo, Irwan Katiwan mengatakan bahwa proyek infrastruktur selalu mengalami pertumbuhan yang besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. "Pertumbuhan industri konstruksi selalu mencapai 7 persen lebih. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional kita kan sekitar 5 persen. Lebih besar kita," ujarnya.

Irwan menambahkan, mulai tahun ini prospek jasa konstruksi semakin kinclong lantaran dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor infrastruktur semakin kencang. Bahkan dia memprediksi pertumbuhan ini bias mencapai dua digit.

"Ruang anggaran infrastruktur

dari APBN kan lebih besar, jadi mestinya jasa konstruksi akan tumbuh tinggi sekali tahun ini. Mungkin belum sampai *double digit* atau paling tidak 8-9 persen," jelasnya.

Soal hambatan, Irwan justru menuding administrasi dan birokrasi pemerintah sebagai hambatan utama. Banyak proyek terlambat lantaran pelelangannya lelet. Pengerjaan konstruksi pun dibatasi dalam waktu singkat, yakni sekitar 6 bulan dan kalau terlambat terancam dihukum.

"Kita cuma dikasih ruang waktu sisa. Mereka persiapan 6 bulan, kita disuruh kerja 6 bulan. Kalau konstruksinya rusak dibilang kerjanya enggak bener, padahal waktunya enggak sesuai," keluh Irwan. /Moh Sahlan

Rahmat Gobel:

MEA Bisa Hantam Neraca Perdagangan Indonesia

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menciptakan integrasi perdagangan 10 negara Asia Tenggara memicu kekhawatiran Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel. Dia meragukan kesiapan Indonesia untuk bersaing dengan produk-produk negara lain di kawasan regional.

"Menurut saya kita belum siap. Posisi pasar Indonesia, kita hanya dijadikan pasar karena kita belum mengelolanya dengan baik," kata Rachmat di Jakarta, Senin (23/2).

Bos Panasonic di Indonesia ini pun mengingatkan bahwa transaksi perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN masih defisit. Neraca perdagangan Indonesia hanya surplus dengan Filipina. Jika MEA diberlakukan, devisa neraca perdagangan pun bias semakin parah.

"Ini belum berbicara ASEAN-Tiongkok dan lainnya. Tinggal delapan bulan lagi kita memasuki MEA, jika kita tidak memikirkan sesuatu, bisa saja kita defisit dua kali lipat," kata Rachmat.

Sebagai menteri, Rachmat berharap semua sektor segera berbenah dan berusaha membangun nilai tambah dari industri dalam negeri. Sebab selama ini kelemahan Indonesia adalah tidak adanya persiapan matang untuk menghadapi pasar bebas di kawasan ASEAN.

Indonesia dan semua Negara anggota ASEAN akan memberlakukan MEA. Dalam sistem ini, akan terjadi integrasi 10 negara Asia Tenggara dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif sehingga menciptakan akses pasar antar negara yang lebih luas. /Moh Sahlan





LAPORAN KHUSUS

TAWA SETELAH TERANIAYA

MUNIR/AKTUAL



Putusan Praperadilan BG - Puluhan anggota polisi melakukan sujud syukur atas dimenangkannya sidang Praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).

Dahi puluhan polisi itu langsung menyentuh tanah basah di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (Senin 16/2). Mereka bersujud setelah Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin.

Sorak sorai polisi yang bertugas mengamankan jalannya sidang tidak terbendung lagi. Di luar ruang pengadilan korps Bhayangkara ini berpesta pora. Ini adalah pertama kalinya dalam sistem hukum di Indonesia seorang tersangka KPK menang dalam praperadilan dalam statusnya sebagai tersangka. Salah satu pertimbangan hakim Sarpin mengabulkan permohonan kubu Budi karena ia dinilai bukan pejabat Negara saat melakukan tindakan yang disangkakan oleh KPK.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. "Ternyata jabatan Karobinkar jabatan administrasi golongan eselon IIa, bukan termasuk eselon I," kata hakim Sarpin.

Ekspresi yang ditunjukkan oleh puluhan anggota polisi pengamanan tersebut dinilai wajar oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie. "Mereka merasa lega setelah memendam perasaan yang teraniaya selama beberapa hari, bahkan lebih dari sebulan sejak ada penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/2).

Kelegaan juga tidak dapat

disembunyikan oleh Budi. Ia menyebut keputusan Sarpin adalah jalan kebenaran yang ia nantikan sejak berstatus tersangka. "Dengan keputusan praperadilan tadi, maka KPK tidak punya kewenangan melanjutkan penyidikan terhadap saya. Penyidikan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, tidak pernah ada dugaan tindak pidana korupsi seperti yang disangka KPK," kata Budi dalam wawancara dengan Metro TV, Senin (16/2/2015).

Namun putusan hakim Sarpin bukan tanpa celah. Kritik terhadap keberanian Sarpin disuarakan oleh berbagai kalangan. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa misalnya menilai Sarpin harusnya menolak gugatan Budi. Ia menyebutkan, Pasal 77 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas menyebutkan bahwa penetapan tersangka bukan obyek praperadilan. "Hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. Dia menyatakan, karena (penetapan tersangka) tidak diatur dalam KUHAP, maka hakim boleh memasukkannya. Itu tidak benar," kata Harifin saat dihubungi, Senin (16/2).

Kemenangan Budi memang sangat fundamental. Selama ini tersangka yang ditetapkan oleh KPK memang hanya bisa melakukan pembelaan saat perkara disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini tersangka kasus rasuah bisa melakukan pembelaan seperti Budi. Itulah yang menjadi kekhawatiran KPK. "Yang pasti setelah ini semua yang menjadi tersangka, baik di Polri, kejaksaan, atau KPK, akan mengajukan praperadilan," kata Salah satu kuasa hukum KPK, Chatarina Mulia Girsang. ■

Deddy K

TAK SELAMANYA KPK MENANG

Kekhawatiran KPK tentang akan derasnya gugatan praperadilan langsung terbukti. Pasca dimenangkannya gugatan Budi Gunawan tersangka kasus korupsi yang ditetapkan KPK beramai-ramai mengajukan gugatan. Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin, Mantan Menteri Agama Suryadarma Ali, Sutan Bhatoegana Siregar mengajukan gugatan dengan materi yang mirip dengan Budi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ketiganya masih berjalan saat ini.

Meskipun sebenarnya bukan Budi Gunawan orang pertama yang berani melawan kedigdayaan KPK dalam penegakan hukum. Jauh sebelum Budi memenangkan gugatan melawan KPK, pada tahun 2012 silam hakim Syarifuddin Umar terlebih dahulu menorehkan kemenangan. Tersangka kasus suap yang juga mantan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut sempat membuat KPK membayar denda Rp100 juta lewat gugatan praperadilan. "Perbuatan KPK yang melakukan perbuatan penyitaan maupun penggeledahan di luar barang bukti, dianggap sebagai tindakan yang melebihi kewenangan," ujar hakim ketua sidang praperadilan, Matheus Samiaji, dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Kamis 19 April 2012.

Hakim Syarifuddin ditangkap Rabu 1 Juni 2011 di rumahnya di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Nomor C26 RT 09/16 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia saat itu disangkakan menerima uang dari kurator perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia. Sejumlah uang dan barang disita oleh KPK kala itu. Namun lewat

praperadilan terbukti penyitaan yang dilakukan KPK menyalahi kewenangan. Sebanyak 26 barang bukti akhirnya diserahkan kembali kepada Syarifuddin. Selain itu KPK diwajibkan untuk mengembalikan uang asing milik Syarifuddin yang disita KPK sekitar Rp 2 miliar dari gugatan yang diajukan Syarifuddin sebesar Rp 5 miliar.

Tak puas sampai disitu Syarifuddin kembali mencari keadilan dengan melaporkan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan empat pimpinan yang menentapkan dirinya sebagai tersangka ke Bareskrim Polri. Dalam laporan nomor LP/170/II/2015/Bareskrim tersebut Syarifuddin menduga telah terjadi rekayasa dalam penetapan dirinya. "Saya tidak ada ikatan dengan Polri. Laporan saya sejak 2011, bukan momentum yang saya gunakan. Jadi jauh sebelum masalah ini muncul saya sudah melaporkan. Apakah ini namanya saya menggunakan momentum," tutur Syarifuddin saat disinggung dirinya menggunakan momentum perseteruan KPK vs Polri.

Sejumlah bukti yang digunakan KPK untuk menjerat dirinya bahkan sudah dinyatakan tidak otentik saat sidang digelar di pengadilan Tipikor Jakarta. Diantaranya penggunaan surat palsu berupa Akta Otentik yang dikeluarkan Notaris Edy Suparyono. Fakta yang menurutnya telah terbukti para Kurator dengan sengaja menempatkan keterangan palsu pada Akta Otentik di Pengadilan Tipikor Jakarta, akan tetapi tetap digunakan oleh KPK. Sementara untuk membuktikan otentifitas akta tersebut, notaris secara sengaja tidak dihadirkan ke persidangan.

"Pada Akta Notaris itulah muncul bahwa seolah-olah saya selaku Hakim

Pengawas memberikan ijin kepada kurator untuk menjual aset debitur pailit PT Sky Camping Indonesia, yang menyatakan bahwa hakim pengawas Syarifuddin setuju dijual secara non boedoeel," ucap Syarifudin kepada Aktual.

Lembaga anti rasuah yang saat itu dipimpin Busyro memalsukan juga suaranya, yakni berupa rekaman penyadapan yang diputar di muka





Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nonaktif Syarifuddin (kiri), mendengarkan kesaksian saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (15/11).

persidangan. Dalam rekaman yang seolah-olah percakapannya dengan Puguh menyinggung masalah uang.

KPK menurutnya tidak berani mengkonfrontir keaslian rekaman

percakapan tersebut antara dirinya dengan ahli Akustik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Padahal ahli tersebut dihadirkan untuk mengungkap suara dalam rekaman dimaksud.

KPK justru memperdengarkannya pada saat Puguh bersaksi. Untungnya, Puguh menyatakan sebenarnya mengenai percakapan rekaman, bahwa pembicaraan

itu bukan antara dirinya dengan Syarifuddin. "Suara itu saya yakini tidak benar. Saksi Puguh di muka persidangan menyatakan bukan lagi 100 persen, tapi 1000 persen itu bukan suara hakim Syarifuddin. Saya berfikir, pantas dia tidak ajukan, tidak dia perdengarkan pada saat pemeriksaan ahli suara dihadirkan," kata dia.

Masih menyangkut pemalsuan,

transkrip pembicaraannya yang dijadikan barang bukti KPK dalam bentuk CD nomor MAPA 07 PA 12105022 juga jauh dari kebenaran. Penyadapan dinyatakan dalam transkrip pembicaraan tertanggal 4 Mei 2011 pukul 09.10 Wib. KPK menyatakan bahwa percakapan yang disadapnya merupakan pembicaraan antara saksi Michael Markus Iskandar Pohan dengan Puguh Wirawan.

Padahal, ungkap Syarifuddin, yang sebenarnya adalah percakapan antara Puguh dengan Johansyah dari pihak PT BNI Persero. Ia lantas menekankan empat nomor telepon genggam terakhir milik Michael yakni 1199 dan milik Puguh yakni 2790 yang sudah diakui kebenarannya oleh kedua saksi.

Percakapannya diawali dengan perkataan "Pagi Pak Johan" oleh Puguh dan dibalas "Hallo, Assalamu'alaikum Pak Puguh. Puguh membalas lagi dengan mengatakan 'Ya Pak Johan'".

"Pagi Pak Johan, jadi siapa ini yang berbicara ini? Antara Puguh dan Johan, tetapi pada bukti transkrip pembicaraan disini antara Michael Markus dengan Puguh. Disini KPK membuat dan menempatkan transkrip palsu," jelasnya.

Syarifuddin menyebut KPK dengan keahliannya memindahkan suara percakapan seseorang dengan seseorang lainnya hingga memunculkan kesan percakapan sebenarnya. Anehnya, hal itu dijadikan barang bukti.

Ia menduga melalui pintu Johansyah, lembaga antirasuah yang berkantor di Jalan Rasuna Said Kuningan melakukan kerjasama. Yakni dengan menitipkan pesan-pesan tertentu KPK. Untuk membenaran alibinya itu, Syarifuddin menyatakan memegang semua bukti-buktinya. "Jadi terkait itu semua sudah saya sampaikan ke Bareskrim. Yang saya laporkan kemarin, adalah KPK pandai merekayasa kasus, KPK pandai melakukan pembohongan publik dan menjadi tukang ramal," tegas dia.



Syarifuddin mengaku memegang bukti-bukti kebohongan KPK dalam menangani perkara yang membelitnya. Dan, bukti-bukti itu telah diserahkan dan disampaikan ke penyidik Bareskrim menyusul bukti awal laporannya.

Dari rekaman selama jalannya persidangan hingga administrasi penanganan perkaranya. Seperti rangkap jabatan penyidik dan penyidik KPK, surat tidak sesuai fakta mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) hingga menghalangi dirinya mendapatkan remisi selama dipenjara dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana surat pemanggilan Nomor Spgl-1247/23/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

Syarifuddin sendiri diketahui divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, 28 Februari 2012. Ia dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan. Akan tetapi, majelis hakim yang diketuai Gusrizal memerintahkan semua barang bukti yang telah disita diluar berkas dakwaan harus dikembalikan. Majelis menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta terdakwa melakukan pembebanan pembuktian terbalik terhadap kepemilikan harta seperti uang asing yang disita dari penggeledahan di rumah Syarifuddin. Informasi yang dihimpun Aktual Syarifudin memang telah lama menjadi target KPK era Busyro. "Bisa jadi saya



Busyro Muqoddas

ditarget karena saya memang dulu sempat mempermalukan Busyro saat dia masih di Komisi Yudisial (KY),” tegasnya.

Busyro memang banyak bersinggungan dengan hakim sejak menjabat sebagai komisioner KY. Perang Busyro terhadap kinerja Hakim bahkan dibawa saat menjabat sebagai komisioner KPK. Salah satu prestasi besar Busyro adalah kala berhasil mengungkap kasus korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin. Saat itu Busyro mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan Nazaruddin melibatkan banyak kementerian dan lembaga Negara dengan total kerugian

mencapai Rp 8,6 triliun.

Namun perkara ini pula yang sempat menyeret Busyro ke komite etik. Tim yang saat itu dipimpin Abdullah Hehamahua memeriksa Busyro dan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis setelah Nazar banyak menuding aliran dana kepada pimpinan KPK. Yang sedikit mengejutkan, pada tim komite etik, Yulianis menyebut Nazaruddin pernah memintanya menyiapkan sejumlah uang untuk diberi pada orang yang diduga pihak KPK berinisial CDR. “Tapi dia nggak tahu siapa CDR,” kata Abdullah di gedung KPK, Selasa (6/9). Selain itu, Yulianis juga tak bisa merinci berapa jumlah uang yang diberi pada

seseorang berkode CDR itu.

Dia juga tak yakin apa uang itu sampai atau tidak ke tangan CDR. Kata Abdullah, kode CDR itu tiba-tiba muncul saat Yulianis ditanya siapa saja orang-orang yang pernah diberi uang oleh Nazaruddin. Mendapat pertanyaan seperti itu, Yulianis menyebut beberapa kode. Namun saat pertanyaan mengerucut apakah ada ke pimpinan KPK, Yulianis menyebut kode CDR.

Kala itu, Nazaruddin memerintahkan Yulianis menyiapkan sejumlah uang tunai yang nanti akan diserahkan pada seseorang yang berkode CDR. Mendapat kode itu, Komite Etik langsung minta Yulianis mengingat-ingat siapa kode CDR itu. Namun Yulianis tak bisa. Sebab, kata dia, Nazaruddin selalu menyebut nama seseorang dengan kode dan tak menerangkan siapa nama orang tersebut.

Bahkan saat tim Komite Etik menyebut satu-satu nama pimpinan KPK apakah ada yang menerima termasuk Chandra M Hamzah yang nama paling dekat dengan kode tersebut, Yulianis mengaku tak tahu.

Chandra M Hamzah sendiri memang beberapa kali disebut-sebut Nazaruddin telah menerima uang darinya. Saat masih buron di luar negeri, Nazaruddin terus ‘menyerang’ Chandra. Dia menuding pada November 2010 silam, Chandra pernah berkunjung ke rumahnya dan menerima uang miliaran rupiah untuk mengamankan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan seragam hansip dalam Pemilu 2009.

Dalam beberapa kesempatan, Chandra terus membantah dia pernah menerima uang dari Nazaruddin. Bahkan dia menantang agar Nazaruddin membuktikan semua ucapannya. Hal senada juga diucapkan Abdullah. Meski Yulianis mengatakan ada kode CDR, Komite Etik tak menerima begitu saja. Apalagi, Yulianis juga tak bisa memastikan apakah uang-uang yang diminta bosnya itu benar-benar sampai ke tangan CDR. ■

Soemitro



FITNAH ATAU FAKTA

Ketua KPK non aktif Abraham Samad tegas mengatakan foto mesra dirinya dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira bagian dari fitnah dan serangan terhadap KPK. Bukan hanya Abraham yang membantah foto yang beredar luas di media sosial tersebut. Bahkan KPK secara lembaga melalui Bambang Widjojanto menyebut foto mesra itu sebagai produk rekayasa. Bambang yang saat itu masih menjabat aktif sebagai Wakil Ketua KPK menyebut telah melakukan uji digital dengan melibatkan tim forensik KPK. "KPK sudah mengkaji foto yang sudah beredar dan dipastikan itu adalah hasil editan dan rekayasa," ujarnya (14/1).

Namun keyakinan KPK segera luntur setelah Komisi III DPR mengundang Supriansyah pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD. Ia memberikan kesaksian saat DPR mendalami artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" yang memuat hasrat Samad dalam bursa Calon Wakil Presiden pada pemilu 2014 lalu. Di depan Komisi III Supriansyah mengakui Samad pernah bertemu

dengan Elvira di apartemen nya. Bahkan keduanya sempat berdua saja dalam satu ruangan. "Saya tidak tahu siapa yang mengundang. Saya hanya diminta untuk menjemput putri di bawah dan mengantarkan ke atas (unit apartemen)," kata Supriansyah, dalam keterangannya di RDPU Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/2).

Ia pun sempat mengatakan, sesampainya di ruangan unit, dirinya sempat menawarkan makan kepada Elvira. Dia meminta untuk makan gado-gado, dan langsung dibelikan Supriansyah yang berada di Pacific Place SCBD. "Saya membelikan gado-gado di lantai *ground* di Pacific Place," ucapnya.

Mendengar pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman kemudian mencecar sejumlah pertanyaan. "Anda beli gado-gado, ada berapa orang di unit anda?," tanya Benny.

Ia pun menjawab, yang berada di unit ruangan apartemennya hanya diisi tiga orang, yakni Abraham Samad, Elvira dan Supriansyah. "Sewaktu saya pergi beli gado-gado

tinggal berdua (Abraham dan Elvira)," ucap dia yang sontak direspon suara sorak, baik dari anggota Komisi III maupun para tamu yang mengikuti jalannya rapat di balkon atas.

Sepak terjang KPK di "belakang layar" memang tengah jadi sorotan saat ini. Bahkan sorotan juga tidak luput kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini menjadi tameng KPK. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut KPK menggelontorkan dana sebesar Rp30 miliar kepada sejumlah LSM. "IPW menilai, Bareskrim perlu mengusut kasus ini. Sebab KPK adalah lembaga negara yang jumlah pendanaannya dari Negara sangat terbatas. KPK bukanlah perusahaan profit atau konglomerasi NGO yang bertugas menyalurkan dana-dana luar negeri ke sejumlah LSM," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Senin (9/2).

Tudingan ini lagi-lagi dibantah dan dianggap fitnah oleh KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW). "Buktiin aja.



RDP Terkait Kasus Abraham Samad: Pemilik apartemen yang juga Sahabat Abraham Samad, Supriansyah (kanan) bersama Mantan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (tengah) dan mantan Koordinator Tim 11 Andi Widjajanto (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Foto kiri: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjelaskan mengenai gambar yang menjadi polemik saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/2).

seperti dikutip dalam dokumen. Komisi III juga meminta laporan pertanggungjawaban dan kegiatan yang diterima dari NGO.

Komisi III DPR saat itu juga meminta penjelasan KPK bahwa organisasi yang mendapat alokasi anggaran kemitraan komunitas, diantaranya Pukat UGM, ICW, TII dan Kemitraan, merupakan nama-nama ormas dan komunitas yang mendapat bantuan dari KPK. Dan KPK akan menyiapkan tanda terima terhadap pemberian alokasi tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad saat itu membenarkan hibah yang diterima oleh 51 LSM. "Bisa saya pastikan, tidak ada anggaran berbentuk materi. Itu kan ada program-program pemberdayaan," kata Samad 8 Juli 2012 silam.

Dia menegaskan, KPK tidak pernah menunggangi ICW dalam mengeluarkan hasil penelitian atau rilis apa pun. Termasuk rilis tentang 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. "Namanya KPK pasti difitnah, wajar lah biasa kalau kami difitnah. Semakin banyak orang memfitnah semakin banyak amal kita di bulan Ramadhan," ujarnya.

Dokumen yang diterima Aktual menyebutkan 51 LSM yang disebut menerima hibah dari KPK.

Neta S Pane mengatakan pemberian hibah ini sempat hendak diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) era Hadi Poernomo. "Hal inilah yang diduga menjadi sebab penetapan tersangka atas mantan Ketua BPK Hadi Purnomo yang hingga sekarang tidak pernah diproses KPK," bebernya.

IPW, ucap Neta mendesak, Bareskrim Polri mengusut dugaan penyalahgunaan dana KPK itu dengan cara membuka audit BPK dan meminta penjelasan Hadi Purnomo. "Jika ditemukan data-data penyalahgunaan anggaran di KPK, Bareskrim jangan ragu dan takut untuk membongkarnya dan memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pejabat KPK maupun sejumlah LSM yang menerima dana Rp 30 miliar dari KPK tersebut," tandasnya. ■

Moh Sahlan

51 LSM YANG DISEBUT MENERIMA HIBAH DARI KPK

Puskaki Bengkulu	Trapesium Malang	PHP UNAND Padang
SPEAK STAN	GMKI Cabang Medan	Garda Tipikor FH Unhas
FH Universitas Galuh	GEBRAK	LKAK Makassar
TPAK Unpas	KAK UNAND	KITA
School Ranger	Indonesian YAC	Pelopor Muda UNIMED
Somasi Bali	IPPMKK Pekanbaru	Lingkar Cendekia Sultra
Kecak Udayana	PAKSI Tasikmalaya	GEMA PENA UPI
SIMAK STIAMI	KOMPAK Untan	Student Corruption Watch NTP
SERRUM	Jember Againts Corruptions	BATIKS Lampung
Sekolah Kader Bangsa	GPMK UIN Kalijaga	GEPAK Jakarta
KM ITB	LISUMA GUNADAMA	KAPAK CILACAP
Lingkar Merdeka Jakarta	GEMAK Unnes	KOMPAK PARAMADINA
DOMBAKU	GERASI Untirta	BEM Universitas Mahasaraswati
LAKMM UMY	UII	BEM UNESA
DEWA Justicia FH UGM	Komunitas Jujur Sebelas Maret	CICAK Solo
Club Speak TII	PPS Sumekar	FLAC Indonesia
BEM PN	Forum Silaturahmi Pemuda Lombok Tengah	Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kita mau dengerin gosip? Kita mau dengerin atau tunjukkan saja buktinya," tantang Koordinator ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (21/2)

Penelusuran Aktual mengkonfirmasi aliran hibah kepada LSM tersebut terkonfirmasi dalam dokumen laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR Senin 25 Juni 2012. Pada rapat yang

dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin itu terungkap KPK memang mengalokasikan dana kepada LSM. Demikian tercatat dalam laporan hasil RDP.

Pada kesimpulan poin ke 11 berbunyi "Pimpinan meminta penjelasan KPK, organisasi mana atau komunitas mana yang mendapat alokasi anggaran dari KPK,"



RUMAH KACA KPK

Umurnya 67 tahun saat Hadi Poernomo memotong tumpeng 21 April 2014. Hari itu juga Pak Pung sapaan Hadi Poernomo melepas jabatannya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pensiun. Hari terakhirnya bekerja Hadi meninggalkan kado

penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni hasil audit lanjutan atas *bailout* Bank Century.

Kali ini BPK menelisik tentang suntikan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada PT Bank Mutiara Tbk pada 23 Desember

2013 sebesar Rp1,25 triliun. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Hadi mengatakan ada pengelolaan kredit oleh PT Bank Mutiara yang diduga tidak sesuai ketentuan. Dimana banyak kredit yang seharusnya masuk kolektibilitas kredit lima tapi dicatat ke dalam kolektibilitas

Bahas Mafia Hukum - Ketua KPK Busjro

Mugodas (tengah), didampingi Jaksa Agung Barief Arief (ketiga dari kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo (ketiga dari kanan), memaparkan hasil rapat koordinasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (1/2). Bersama pimpinan KPK lainnya (dari ki-ka) Haryono Umar, Chandra Hamzah, Bibit Samad, serta M. Jasin membahas penanganan masalah hukum dan korupsi, termasuk kasus mafia perpajakan serta mafia peradilan yang menyeret pejabat Kejaksaan serta Polri.



kredit dua."Sehingga seolah-olah laporannya bagus. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 jo. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum," ujarnya.

Temuan ini tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi KPK yang tengah menyidik kasus Century dengan menetapkan dua pejabat

Bank Indonesia sebagai tersangka waktu itu. Namun yang mengagetkan, KPK sore harinya justru menetapkan Hadi sebagai tersangka. Ia dijerat dalam kebijakan mengabulkan keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 2004. "Kerugian negara dari pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara diperkirakan sebesar Rp375 miliar," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Oleh KPK, mantan Dewan Analisis Strategis pada Badan Intelijen Negara (BIN) itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Yakni seperti diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Abraham membantah penetapan Hadi yang dikaitkan dengan munculnya audit Bank Mutiara. "Tidak ada kaitanya," tegasnya.

Temuan penyimpangan pajak Bank BCA ini dilaporkan oleh mantan Inspektur Jenderal Pajak, Hekinus Manao. Hekinus sendiri saat ini menjabat sebagai Executive Director Bank Dunia adalah anak emas mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga sempat dicalonkan sebagai anggota BPK tahun 2013, namun gagal. Bersama tim investigasinya, Hekinus menemukan penyimpangan kebijakan pajak ini tahun 2008 setelah melakukan pemeriksaan sejak tahun 2006.

Lamanya waktu investigasi inspektorat dikarenakan adanya aturan yang tidak memungkinkan Hekinus untuk membuka data wajib pajak. Sesuai dengan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan data tersebut masuk kategori rahasia negara. Baru pada tahun 2007 Sri Mulyani memberikan izin untuk membuka data pajak Bank BCA. Setelah itu baru kemudian dilaporkan kepada KPK. Mendapat status hukum baru dari KPK, Hadi mengaku siap menjalani semua proses yang akan dilakukan oleh lembaga anti rasuah ini.

Status hukum yang disandang Hadi tak pelak membuat suhu

politik tanah air meningkat. Terlebih pengabulan keberatan pajak itu dilakukan saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden. Pak Pung memang disebut "Sangat Merah". Isu miring politisasi kasus Hadi semakin kental manakala partai yang dipimpin Mega yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April lalu.

Informasi yang dihimpun Aktual juga menyebutkan PDI-P juga sempat memonitor Hadi sebagai salah satu kandidat Calon Wakil Presiden. Pengalamannya di dunia intelijen ekonomi dan Dirjen Pajak dinilai mumpuni dibandingkan dengan calon Presiden yang diusung PDI-P. Saat dikonfirmasi mengenai isu ini mantan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo enggan memberikan jawaban.

Selain itu penetapan Hadi juga mengungkap luka lama. Perseteruan antara Hadi dan Sri Mulyani. Sejarah mencatat, Sri lah yang mencopot Hadi sebagai Dirjen Pajak tahun 2006. Pencopotan juga dilakukan tepat saat Hadi merayakan ulang tahun. Sejak saat itu Hadi kembali ke BIN. Akuntan senior itu baru keluar kandang setelah mencoba peruntungan mencalonkan diri sebagai pimpinan BPK. Dua partai yakni PDI-P dan Golkar disebut mendukung Pak Pung.

Dukungan tersebut tidak disia-siakan Hadi. Meledaknya skandal *bailout* Bank Century sebesar Rp6,7 triliun menjadi salah satu amunisi Hadi "membalas" Sri. Dibongkarnya persekongkolan *bailout* yang terjadi sebelum pemilu 2009 yang di menangkan Partai Demokrat itu. Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disebut memutuskan *bailout* Century tanpa didasarkan pada kriteria terukur, melainkan hanya pada *judgement*. Boediono sebagai Gubernur BI saat itu juga diseret. Hadi menolak disebut balas dendam saat itu. "Nggak ada (red-sakit hati), itu fakta-fakta yang ditemukan BPK," tegasnya. ■

Soemitro

TANGAN AMERIKA BERANGUS HADI POERNOMO

Persetujuan antara Hadi Poernomo dan Sri Mulyani tidak lepas dari peran pemerintah Amerika Serikat. Hadi sejak tahun 2004 memang telah menjadi sasaran utama Amerika setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik. Hal ini terungkap dari dokumen kawat rahasia yang dilansir situs Wikileaks.

Dokumen 4 halaman itu mengungkap laporan intelijen Amerika Serikat yang dibuat pada tanggal 29 April 2006 oleh Penasehat Ekonomi Amerika William A. Heidt. Laporan itu dikirim dari kantor kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia 8 hari setelah Hadi dicopot oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai Dirjen Pajak.

Selain dikirimkan ke White House, laporan dengan kode 06JAKARTA5420_a itu juga dikirimkan ke kedutaan besar Amerika di Australia, Central Intelligence Agency (CIA), Kedutaan Besar Amerika di China, Jepang, Korea Selatan dan sejumlah departemen terkait. Setidaknya ada 14 poin yang dimuat dalam laporan itu.

Dimulai dari pencopotan Hadi sebagai Dirjen Pajak tanggal 21 April 2006. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengganti Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang kuat dan korup tanggal 21 April," seperti dikutip dalam dokumen kawat rahasia.

Amerika menyebut pencopotan Hadi bukti dukungan SBY kepada Sri Mulyani. Pencopotan ini tidak lepas dari keluhan investor Amerika kepada Sri Mulyani. Keberadaan Hadi juga dianggap mengganggu kepentingan dalam reformasi Undang-Undang perpajakan. "Keputusan menunjukkan dukungan SBY kuat untuk upaya Departemen Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mereformasi

Departemen Keuangan (Depkeu) birokrasi mengurangi tingkat Korupsi, meningkatkan efektivitas, hambatan dirubah untuk investasi dan Perundang-undangan reformasi pajak tertunda dan menanggapi keluhan investor," seperti tertuang dalam kawat rahasia itu.

Sri Mulyani disebut dalam dokumen itu sebagai pihak yang paling berperan dalam operasi intelijen tersebut. Tiga hari sebelum keluarnya keputusan pencopotan Hadi, Sri Mulyani sudah mengatakan kepada perwakilan donor Amerika Serikat di Indonesia bahwa akan ada pergantian pejabat di sektor pajak. Hal ini salah satu respon Sri Mulyani Indrawati atas keluhan investor Amerika atas kepemimpinan Hadi.

Setelah memastikan Presiden SBY menyetujui pencopotan Hadi, Sri Mulyani terbang ke Amerika. "21 April 2006 pengumuman (pencopotan) dilakukan saat Sri Mulyani ke Washington DC untuk pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)," demikian dikutip dalam kawat diplomatik rahasia itu.

Pada pertemuan di Washington itu Sri Mulyani mengungkapkan adanya kegagalan dalam menjalankan program yang direkomendasikan donor. Terutama dalam administrasi pajak. Sri kemudian didesak untuk perubahan besar. "Masyarakat donor telah mendesak dia (Sri Mulyani Indrawati) untuk "menandai gerakan besar" memberangus Hadi Poernomo yang akan meyakinkan modal dan dukungan yang lebih besar," kata laporan diplomatik itu, seperti

tertuang dalam dokumen.

Sehari setelah tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 26 April 2006 melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo. Selain itu juga melantik Anwar Suprijadi, dan Ahmad Fuad Rahmany masing-masing sebagai, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Bapenam-LK dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45/M tahun 2006



tanggal 20 April 2006.

Dokumen itu juga mengungkapkan sehari setelah pelantikan Sri Mulyani kembali melapor ke utusan Amerika Serikat. "Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada kami pada 27 April 2006 bahwa mengganti tiga Dirjen sebagai langkah pertama," tulis dokumen rahasia itu.

Dalam sambutannya Sri Mulyani meminta pejabat yang dilantik untuk mengoptimalkan teknologi informasi agar meminimalisasi kontak antara wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu Sri Mulyani juga meminta agar pejabat baru menjalankan visi ganda yakni pelayanan pajak dan bea cukai serta penegakan hukum.

Amerika dalam laporan tersebut memberikan julukan The Mighty kepada Hadi. "The Mighty Have Fallen," demikian komentar Amerika mengakhiri laporannya. Amerika Serikat juga menyebut Hadi memiliki pribadi yang arogan selaku Dirjen Pajak. Hadi juga dicatat memiliki reputasi buruk dikalangan pebisnis.

"Korupsi dalam administrasi pajak menjadi salah satu keluhan bisnis terbaik," seperti dikutip dalam kawat diplomatik rahasia.

Amerika Serikat juga tidak menyukai tindakan Hadi yang melakukan pencekalan terhadap wajib pajak yang pajaknya sedang diperiksa oleh lembaganya. Selain itu Hadi juga kerap memonitor harta wajib pajak dengan menggunakan foto satelit.

Intelijen Amerika Serikat juga mencatat Hadi Poernomo sebagai pihak yang membuat menjamurnya suap di lembaganya. "Disiplin di antara petugas pajak terasa terkikis, dan surat ketetapan pajak meningkat menjadi norma, memaksa perusahaan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan keputusan yang lebih masuk akal," dikutip dari dokumen.

Laporan itu juga memuat pendapat salah satu konsultan Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang menyebut, Hadi sebagai Dirjen Pajak paling korup dalam sejarah. "Mr Untouchable akhirnya digulingkan. Cukup menakutkan," demikian pendapat konsultan yang

dikutip dalam laporan itu.

Selain itu data yang juga diberikan kepada Central Intelligence Agency (CIA) tersebut juga memuat pendapat dari Ketua Kamar Dagang Indonesia saat itu MS Hidayat. Serta pendapat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi.

Pada kesimpulan akhir laporan tersebut Amerika banyak memuji kesuksesan Sri Mulyani menyingkirkan Hadi. Sementara itu Presiden SBY disebut gagal menjalankan misinya. "Kegagalan SBY untuk menggantikannya (Hadi Poernomo) melalui 18 bulan pertama pemerintahannya menunjukkan bahwa SBY telah gagal untuk mendapatkan kontrol penuh atas birokrasi," seperti dikutip dalam dokumen.

Amerika Serikat justru memberikan poin kepada Sri Mulyani yang sukses menjalankan perintah penggulingan Hadi hanya dalam waktu lima bulan setelah dilantik 7 Desember 2005. Sri Mulyani juga disebut sebagai produk sukses dalam mencetak teknokrat pro Amerika. "*Sri Mulyani's ability to remove Purnomo after just five months in office confirms our impression that among the GOI economic technocrats, she has the strongest relationship with SBY and appears the most willing to take risks,*" seperti dikutip dalam dokumen.

Kesuksesan operasi intelijen tersebut kemudian diteruskan dengan dijalankannya visi penegakan hukum sektor pajak yang menjadi perhatian Indonesia. Inspektorat Pajak saat itu Hekinus Manao langsung melakukan investigasi terkait kebijakan yang dikeluarkan Hadi selama menjabat. Hasilnya ditemukan penyimpangan dalam pengabulan keberatan pajak PT BCA Tbk.

Pengganti Hadi saat itu Darmin Nasution juga salah satu pihak yang meminta Sri Mulyani untuk membuka data pajak Bank BCA. Sesuai dengan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan data tersebut masuk kategori rahasia negara. Maka untuk

membukanya diperlukan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah data pajak bisa diakses, Hekinus melaporkan temuannya kepada KPK.

Sejarah kemudian mencatat operasi ini berbuah manis untuk Sri Mulyani dan Hekinus. Keduanya mendapatkan jabatan baru sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Eksekutif Bank Dunia. Sementara itu Darmin hanya diplot berkarir sebagai Gubernur BI. Amerika memang tidak terlalu suka dengan Darmin.

Kawat rahasia tersebut mengunci Darmin dengan sejumlah skandal sebelum disetujui sebagai pengganti Hadi. Darmin disebut tidak reformis. "Perusahaan asuransi AS telah menggambarkan lemahnya regulasi dan korupsi di antara Inspektur Asuransi di bawah Nasution merupakan faktor utama di balik lambatnya pertumbuhan sektor ini," seperti dikutip dalam dokumen.

Darmin juga telah dimonitor atau dikunci dalam skandal pemberian uang sebesar USD 100 ribu kepada Komisi XI DPR pada tahun 2004 untuk refisi Undang-Undang Kepailitan. Meskipun ragu dengan Darmin, kawat diplomatik tersebut sudah memberikan garansi bahwa Dirjen Pajak baru akan ada di bawah kendali penuh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani. Darmin juga disebut bukan bagian dari yang Amerika sebut "Reformasi Besar". Ia juga tidak disiapkan sebagai pemimpin seperti ditulis dalam data itu.

Kendali Sri Mulyani atas Darmin juga tampak pada saat ia menghadapi skandal kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh petugas Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu setidaknya ada 151 perusahaan yang menjadi klien Gayus. Namun tidak seperti saat mengungkap pajak BCA, Darmin dan Hekinus pasif menghadapi skandal Gayus. Enam perusahaan asal Amerika Serikat yakni Chevron Indonesia Company dan PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger tercatat sebagai pasien Gayus tidak disentuh. ■

Moh Sahlan

SAAT BPK TELANJANGI KPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) era Hadi Poernomo memang banyak melakukan terobosan. Salah satunya adalah ketika menelanjangi KPK dengan audit kinerja pada akhir tahun 2013. Ini pertamakalinya KPK diaudit kinerjanya oleh BPK. Berdasarkan dokumen audit yang diterima Majalah Aktual sejumlah temuan mengejutkan dipaparkan BPK.

Misalnya tentang alasan banyaknya tersangka yang ditetapkan oleh KPK namun lama dalam penuntasannya. BPK yang melakukan uji petik terhadap penanganan perkara pada tahun 2009-2011 menyimpulkan KPK lebih mengutamakan penilaian kuantitatif dalam penanganan perkara. "Pada periode 2009-2011 penetapan indikator kinerja masih bersifat besaran kuantitatif daripada kualitatif dalam bentuk kompleksitas kasus atau perkara yang ditangani. Hal ini berpotensi mendorong pelaksana KPK untuk lebih mengutamakan pencapaian target penanganan jumlah kasus/perkara daripada penekanan pada penyelesaian kasus atau perkara yang kompleks," seperti dikutip dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 115/

HP/XIV/12/2013 tersebut.

Disinilah penyebab banyaknya kasus mandeg yang ditangani KPK. Berdasarkan catatan Aktual sejumlah kasus sempat mandeg di KPK dalam jangka waktu yang tidak wajar. Kasus korupsi suap pengadaan zat tambahan bahan bakar, tetraethyl lead (TEL) Pertamina tahun 2004-2005 atau dikenal dengan kasus Innospec. KPK menetapkan mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina

Persero, Suroso Atmo Martoyo, dan Direktur PT Sugih Interjaya Willy Sebastian Liem sebagai tersangka pada 2011 dan 2012, sementara penahanan terhadap mereka baru dilakukan pada Selasa (24/2/2015) kemarin.

Temuan lain dari yang diungkap BPK atas kinerja KPK adalah terkait lemahnya Standard Operating



Procedure (SOP) di semua bisnis proses penanganan perkara oleh KPK. Untuk menjaga harmonisasi proses pengembangan SOP yang sifatnya *bottom-up*, Sekretariat Jenderal KPK menerbitkan SK No Kep-153/50/VI/2008 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Penanggungjawab Standard Operating Procedures pada masing-

1

Kegiatan koordinasi dan supervisi penindakan. Tugas koordinasi dan supervisi ilustrasi tidak adanya & tidak terintegrasinya SOP untuk kegiatan yang penting LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK 58 penindakan telah diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2002, namun unit kerja koordinasi dan supervisi penindakan baru dibentuk berdasarkan Peraturan KPK Nomor 03 tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Konsep SOP Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan telah dibuat, namun belum disahkan sehingga belum menjadi panduan resmi pelaksanaan kegiatan.

2

Pelimpahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gratifikasi tidak konsisten dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi karena terdapat LHP yang diserahkan ke Pimpinan dan terdapat LHP yang diserahkan langsung ke Deputi Penindakan.

3

SOP menjelaskan proses penyelidikan secara umum, atau dengan kata lain relatif tidak sedemikian rinci, karena pekerjaan lapangan penyelidikan lebih bersifat fleksibel. Namun, KPK belum melengkapi SOP ini dengan Instruksi Kerja (IK) atau Pedoman yang menjelaskan ketentuan-ketentuan dan cara bagaimana melakukan suatu proses dalam SOP.

masing direktorat/biro Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tim ini bertugas salah satunya untuk melakukan harmonisasi dan integrasi SOP pada tingkat KPK sebelum disahkan dan dilaksanakan. Namun demikian, klarifikasi dengan Sekretaris Tim SOP menunjukkan bahwa tugas-tugas yang tercantum di dalam SK No. Kep-153/50/VI/2008 terutama tugas untuk melakukan harmonisasi dan integrasi SOP pada tingkat KPK belum berjalan secara optimal karena tim hanya bersifat *ad hoc* dan bukan merupakan tugas utama yang tidak terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja.

Salah satu dampak dari tidak tersedianya unit kerja dan tidak optimalnya peran dari Tim SOP dalam melaksanakan harmonisasi dan integrasi SOP, KPK tidak memiliki peta kelengkapan SOP berdasarkan proses bisnis yang dilaksanakannya dan tidak memiliki peringkat prioritas atas SOP yang harus segera diselesaikan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, sebagaimana digambarkan dengan contoh ilustrasi di bawah.

BPK menyimpulkan sistem penanganan perkara di KPK masih sangat tergantung dengan integritas dan pengalaman pegawainya. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua pegawai atau penyelidik dan penyidik KPK memiliki kualitas pekerjaan yang sama layaknya organisasi yang telah matang.”

Permasalahan tersebut disebabkan kebijakan Pimpinan KPK yang belum optimal mendorong percepatan pemberlakuan prosedur kerja dan perbaikan pengelolaan prosedur kerja dalam aspek perencanaan, pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta aspek legalitasnya dalam bentuk pengesahan prosedur kerja secara memadai,” seperti dikutip dalam LHP.

Hasil temuan BPK ini dijawab oleh KPK. Salah satunya tentang temuan tidak terdokumentasinya proses penindakan yang dilakukan oleh KPK saat penyidikan. ”KPK merupakan lembaga yang *multitasking* sehingga kegiatan yang sifatnya administratif birokrasi yang tidak terkait secara langsung dengan penanganan perkara dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis (*paperless*). Manajemen *paperless* dimaksudkan juga untuk menjaga kerahasiaan suatu proses penanganan kasus/perkara,” ujar KPK menjawab hasil audit.

Data mengejutkan juga diungkap BPK tentang penindaklanjutan laporan perkara tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu 2009-2011 tercatat ada 16.657 laporan. Jenis laporan langsung paling banyak diterima KPK sebanyak 2.218 dalam kurun waktu tersebut. Dari total laporan tersebut 2.017 ditindaklanjuti ke penindakan. Namun setelah diklarifikasi di lapangan hanya 176

laporan yang bisa ditindaklanjuti.” Jumlah informasi yang tidak ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan selama 3 tahun mencapai 56,30% dari total nota dinas,” seperti dikutip dalam laporan.

Dari temuan jumlah laporan yang menggunung tersebut BPK menyimpulkan “proses input untuk penyelidikan belum sepenuhnya optimal yang dibuktikan dengan hampir 20 % input ke Dit Penyelidikan akan diarsipkan. Kondisi ini terjadi karena perbedaan kualitas pelaksanaan pekerjaan pengolahan bahan yang akan diajukan ke penyelidikan dan kurang dilibatkannya Dit Penyelidikan dalam pengolahan data pengaduan masyarakat sebelum sampai tingkat penyelidikan. Hal ini mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses input penyelidikan pada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan ke tingkat penyelidikan menjadi tidak termanfaatkan,” seperti dikutip dalam LHP.

Selain itu masih banyak temuan terkait dengan tidak adanya standar dalam penyusunan berkas penindakan yang diungkap BPK. Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan hasil audit inilah yang kemudian juga membuat pihak KPK berang dengan Hadi Poernomo. Maka tak sampai dua bulan sejak LHP ini selesai digarap BPK Hadi ditetapkan sebagai tersangka. ■

Deddy K

4

Dalam tahap penyelidikan, ekspose merupakan metode peyakinan kualitas pekerjaan yang paling penting. Namun, SOP tidak menjelaskan secara jelas mekanisme ekspose yang mencakup tata cara, dokumen/bahan minimal yang akan diekspose, serta bagaimana pemastian kualitas hasil ekspose.

5

SOP Penuntutan juga tidak secara tegas mengatur substansi rencana penuntutan (rentut) atau panduan dalam penetapan rencana penjatuan pidana badan dan bagaimana mekanisme Pimpinan KPK dalam menyetujui (mengurangi atau menambah) perhitungan pidana badan yang diusulkan oleh JPU saat menyusun rentut dimaksud.

6

SOP Penyelidikan tidak menjelaskan secara tertulis prosedur penyampaian sumber informasi dugaan kejadian TPK dari LHKPN, Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat kepada Pimpinan KPK, prosedur analisis Pimpinan KPK, prosedur pengambilan keputusan Pimpinan KPK untuk mendisposisikan dugaan TPK kepada Direktorat Penyelidikan melalui Deputi Penindakan.



Menanti Ujung Perseteruan Tutut vs Hary Tanoe

Perseteruan Siti Hardiyanti Rukmana dengan Hary Tanoesoedibjo berlanjut. Keduanya saling klaim kemenangan satu sama lain atas perebutan hak milik atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang kini menjadi MNC TV.

Tutut berpegang pada putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah

Agung (MA), sementara Tanoe berpegang pada putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Putusan MA Nomor 238 PK/Pdt/2014 yang diketuk pada 29 Oktober 2014 memenangkan pihak PT CTPI yang mewakili pihak Siti Hardiyanti Rukmana atas PT Berkah

yang mewakili Hary Tanoesoedibjo. PT CTPI dinyatakan sebagai pemilik izin frekuensi dan siaran TPI (kini MNC TV).

Amar putusannya membatalkan kepemilikan 75 persen saham PT CTPI oleh PT Berkah. Pihak Tanoe juga diharuskan mengembalikannya ke Tutut sebagai pemegang saham



CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo tampil saat acara MNC marketing Gathering di Jakarta (15/3/2011).

majority PT CTPI sebesar 100 persen. MA membatalkan dan menyatakan tidak sah keputusan RUPSLB dan menghukum Berkah untuk mengembalikan keadaan CPTI seperti keadaan semula sebelum RUPSLB.

Adapun Pengadilan BANI dalam perkara yang sama memutus perkara sebaliknya pada 12 Desember 2014. Kepemilikan saham 75 persen PT

CTPI diputuskan BANI tetap milik PT Berkah. Tutut bahkan diwajibkan membayar pinjaman berikut *cost of fund* (hutang) sebesar Rp 510 miliar.

Sampai disini, pihak Tanoe menekankan meski pihak Tutut posisinya diperkuat MA akan tetapi tidak mengubah *investment agreement* dengan PT Berkah Karya Bersama terkait kepemilikan PT CTPI. Perjanjian investasi yang disebut pihak Tanoe sebagai produk hukum yang bersifat final dan mengikat sehingga setiap warga negara yang patuh pada hukum seharusnya melaksanakannya.

“Kami tengah menyiapkan langkah-langkah eksekusi putusan BANI,” tegas kuasa hukum PT Berkah, Andi F Simangunsong, dalam keterangannya kepada wartawan Senin dua pekan lalu.

Rencana eksekusi atas putusan BANI difokuskan pada aset PT CTPI yang tersebar di beberapa negara seperti di Singapura, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. PT Berkah juga telah mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Januari 2015. Langkah ini diambil salah satunya karena pihak Tutut tidak menunjukkan itikad baik untuk tunduk pada putusan BANI.

Masyarakat Pemantau Peradilan Arbitrase Nasional menilai putusan BANI yang menetapkan PT Berkah berhak atas 75 persen saham PT CTPI telah mengesampingkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Putusan MA. Perjanjian investasi antara PT Berkah dengan PT CTPI ditekankan ada klausul *Share Submission Agreement*.

“Klausul *Share Submission Agreement* bukan berarti secara otomatis saham Siti Hardiyanti Rukmana dapat berpindah ke PT Berkah,” tegas Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Arbitrase Nasional, Johannes Nenes.

Arbiter BANI, menurutnya salah menerapkan konstruksi hukum dengan mengesampingkan putusan PK Mahkamah Agung yang menyatakan PT Berkah telah

melakukan perbuatan melawan hukum dalam penjanjian investasi antara PT CTPI dan PT Berkah dan bisa mengarah kepada perbuatan tindak pidana dengan melakukan pengelapan saham PT CTPI oleh PT Berkah.

Konstruksi hukum MA, ditekankan Nenes adalah membatalkan RUPS PT CTPI yang dilakukan oleh PT Berkah tanpa sepengetahuan pemegang saham PT CTPI pada 18 Maret 2003. Dan mensahkan RUPS PT CTPI 17 Maret 2003 yang digelar oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Adapun putusan BANI yang mengharuskan pihak Tutut membayar Rp 510 milyar ke PT Berkah juga keputusan yang salah. Sebab, sekalipun ada surat kuasa dari Tutut pada PT Berkah untuk restrukturisasi PT CTPI biaya yang dikeluarkan tidak transparan penggunaannya.

“Putusan BANI dalam sengketa antara PT Berkah vs Siti Hardiyanti Rukmana harus dan bisa dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Nenes.

Pendapat berbeda disampaikan pakar hukum perdata Universitas Negeri Semarang, Pujiono. PN Jakarta Pusat, menurutnya berkewajiban membantu putusan BANI dalam proses eksekusi. Yakni dengan membentuk tim eksekutor agar bisa melaksanakan eksekusi.

Tim ini dalam pelaksanaannya secara umum didampingi pihak keamanan dalam proses eksekusi. Dengan harapan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ditekankan bahwa BANI adalah jalur di luar pengadilan yang diakui oleh pemerintah sehingga putusannya juga harus dilaksanakan oleh pihak terkait.

“BANI sudah beri putusan dan pasti pengacara PT Berkah Karya Bersama (BKB) sudah berkirin surat kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk melakukan eksekusi dan PN berkewajiban membantu putusan BANI itu,” kata dia. ■

Moh Sahlan

Abraham Tersangka “Rumah Kaca”



Status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dalam kasus “Rumah Kaca” baru ditetapkan pada Kamis (26/2) malam, kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso.

“Baru resminya kemarin malam. Usai gelar perkara,” katanya di Jakarta, Jumat malam.

Ia mengaku, bahwa sebelumnya telah meminta penyidik untuk tidak terburu-buru menetapkan Samad sebagai tersangka kasus itu karena harus lengkap terlebih dahulu berbagai buktinya.

“Saya sebelumnya minta jangan terburu-buru (Untuk menetapkan tersangka, red.). Harus dilengkapi (bukti-bukti, red.) dulu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kurang,” katanya.

Ia membenarkan pernyataan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa Samad telah ditetapkan tersangka seminggu lalu.

Menurut Waseso, saat itu penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara, sedangkan penetapan tersangka secara resmi baru dilakukan pada Kamis (26/2) malam,

setelah bukti lengkap.

Sebelumnya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa Ketua KPK nonaktif Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim atas laporan LSM KPK Watch Indonesia terkait dengan kasus dugaan pertemuan dengan pihak beperkara.

“Iya sudah tersangka (Kasus Rumah Kaca, red.). Sudah seminggu lalu,” kata Badrodin di Jakarta, Jumat.

Kasus Rumah Kaca itu merupakan laporan Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide, beberapa waktu lalu ke Bareskrim.

Pelaporan tersebut didasarkan pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”.

Dalam artikel tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politikus Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. / Deddy.K

Penunjukan PLT Pimpinan KPK Munculkan Kecurigaan

Koordinator Divisi Monitoring Hukum Dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengkhawatirkan jika penunjukan mantan Anggota



Polri Taufiequrachman Ruki dan pengacara Indriyatno Seno Aji sebagai pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dapat membuat penanganan beberapa kasus korupsi di KPK terhambat.

“Kami berharap, dua orang ini bisa membuktikan tidak benar ada titipan untuk tidak melanjutkan suatu kasus korupsi,” cetus Emerson di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alasan yang dikemukakan Emerson cukup masuk akal, pasalnya Indriyatno dan Ruki yang ditunjuk sebagai Plt, disinyalir akan terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani perkara yang kini ada KPK.

Oleh karenanya, Emerson menyarankan agar Ruki tidak ikut memberikan pendapatnya dalam kasus yang melibatkan lembaga yang membesarkan dirinya.

Presiden Jokowi, Rabu pekan lalu menunjuk Ruki, Indriyatno dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK, untuk menggantikan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ketiganya akan memimpin KPK bersama dua komisioner lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen dengan masa tugas hingga tiba masa pemilihan pimpinan KPK yang akan digelar akhir tahun ini. / Deddy.K



Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan seharusnya Pemerintah Australia menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Sikap Tegas Indonesia Terhadap Pemerintah Australia, Atas Eksekusi Mati Duo Bali Nine

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh JK saat menerima telepon langsung Menlu Australia Julie Bishop, terkait dengan dua terpidana mati kasus narkoba yang berasal dari Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Kamis pekan lalu.

JK menambahkan walaupun tidak mengutarakan secara langsung agar kedua warga negaranya tidak jadi dieksekusi mati, tetapi Bishop tetap meminta pertimbangan bijak Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, secara tegas, JK mengatakan pemerintah tidak bisa mengubah keputusan tersebut, dan proses hukum telah berjalan.

JK mengatakan sambungan telepon dengan Bishop sebagai klarifikasi pernyataan PM Australia Tony Abbott dalam pembicaraan via telepon sebelumnya dengan dirinya. Bishop kata JK khawatir

jika pernyataan Abbott kemudian disalah-artikan sehingga membuat hubungan kedua negara kembali memanas.

Rabu (18/2) Abbott mengeluarkan pernyataan seharusnya Indonesia membalas bantuan Australia untuk korban Tsunami Aceh tahun 2004, sebesar Aus\$ 1 Milyar. Tak hanya itu saja Abbott mengancam jika Indonesia tetap mengeksekusi mati kedua warga negaranya, akan berdampak terhadap hubungan diplomatik Australia dan Indonesia.

Tentu saja pernyataan Abbott yang mengungkit kembali bantuan Tsunami kepada Indonesia menuai kecaman dari berbagai pihak, bahkan kolega senior Abbott menganggap pernyataan tersebut dapat merusak strategi Abbott guna menyelamatkan duo Bali Nine. / Deddy.K

Polri Kerahkan Tiga Satuan Selidiki Obat Anestesi PT Kalbe Farma

Juru Bicara Polri Irjen Ronny Frangky Sompie mengatakan pihaknya tengah mengusut meninggalnya dua pasien RS Siloam Tangerang pasca dilakukan pembiusan, karena ada dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Kalau sudah masuk pidana umum, kami yang tangani," cetus dia di Jakarta, Kamis (19/2).

Ronny menambahkan, Polri sudah menerjunkan tiga satuan untuk menyelidiki kasus ini, dua satuan berasal dari Kepolisian Resort Tangerang dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sedangkan untuk keperluan forensik, Polri mengerahkan satuan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri.

Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparingga mengatakan pihaknya

telah mengintruksikan untuk menarik seluruh peredaran Buvanest Spinal di pasaran dan membekukan sementara ijin edar obat anestesi produksi PT Kalbe Farma.

"Karena ijin edarnya dibekukan, produksinya di pabrik juga dihentikan," kata Roy di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Tindakan tersebut kata Roy diambil sambil menunggu hasil investigasi menyusul penggunaan Buvanest yang kandungannya tidak sesuai dengan label di RS Siloam Lippo Tangerang yang mengakibatkan dua nyawa melayang.

Selain investigasi menyeluruh, tambah Roy pihaknya juga meminta produsen Buvanest untuk mengkaji



mengapa kandungan obat dalam ampul tidak sesuai label. Seharusnya ampul Buvanest berisi bupivacaine untuk obat bius tetapi malah berisi asam traneksamat yaitu golongan obat antifibrinolitik untuk mengurangi pendarahan saat pembedahan.

Berdasarkan hasil penyelidikan BPOM di RS Siloam, diketahui jika ampul Buvanest sebagian berisi bupivacaine dan sebagian lagi berisi asam traneksamat. / Deddy.K



Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto didampingi jajaran direksinya saat konferensi pers terkait strategi pengadaan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Integrated Supply Chain (ISC) di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Kapan **Pertamina** Berubah

Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, serta jajaran direksi Pertamina buru-buru pergi meninggalkan wartawan usai jumpa pers di kantor Pertamina, Jakarta, 17 Februari 2015. Jumpa

pers ini membahas hasil lelang impor pengadaan minyak mentah sebanyak 4 juta barel yang dilakukan oleh ISC. Namun, pengajuan pertanyaan kepada narasumber dibatasi hanya untuk tiga pertanyaan, bahkan ritual wawancara non formal alias *doorstop* yang biasa dilakukan wartawan tidak

dibolehkan.

Situasi tak biasa dalam proses peliputan ini menimbulkan aneka kecurigaan, khususnya kemungkinan adanya kongkalikong dalam tender impor pengadaan minyak mentah yang kini menjadi kewenangan ISC. Tender pertama sendiri dimenangi



dua perusahaan, yakni Socar dengan minyak mentah Azeri (Azerbaijan) sebesar 2 juta barel, serta Vitol dengan minyak mentah Nigeria sebesar 2 juta barel.

Kecurigaan tentang kongkalikong dalam tender cukup beralasan karena Daniel Purba tidak bisa menjabarkan secara terang tentang harga yang disepakati dalam impor minyak mentah itu. Dia beralasan publikasi soal harga tidak etis

dalam dunia bisnis. Padahal sejak era Presiden Soeharto sampai saat ini Pertamina selalu disoroti perihal transparansi. "Bukannya tidak transparan, tapi ini berkaitan dengan etika bisnis. Kita juga ingin lebih menjaga iklim *international trading*," kilah Daniel.

Pertanyaan soal harga yang disepakati dalam impor minyak mentah ini sebenarnya sangat penting, lantaran sejak awal Pertamina gambar-gembor soal transparansi. Opini tentang transparansi ini pula yang akhirnya memuluskan langkah Pertamina untuk mengalihkan kewenangan pembelian impor minyak dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke unit ISC. Pertamina sering teriak-teriak bahwa pengalihan fungsi pembelian impor minyak dari Petral ke ISC bisa memangkas 2-3 mata rantai pembelian minyak impor.

Setelah opini ini terbangun, maka sejak 1 Januari 2015 fungsi pembelian impor minyak itu resmi dilakukan ISC. Dari pengalihan ini, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto sesumbar mampu menghemat 2,3 juta dollar AS dalam sekali pengapalan. Dia acap kali berpidato bahwa pelimpahan kewenangan penjualan dan pembelian minyak mentah kepada ISC jauh lebih efisien dan hemat anggaran dibanding melalui Petral.

Janji penghematan di sektor energi memang acap kali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo di awal masa jabatan. Bahkan kerjasama di sektor energi menjadi prioritas pertama Jokowi. Pada tanggal 31 Oktober 2014 misalnya, kurang dari sebulan setelah dilantik Jokowi langsung menandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Angola. "Hari ini telah di tandatangani, *MoU* antara Pertamina dengan Sonangol, ini BUMN, satunya lagi juga BUMN, dan ini adalah kerja sama pertama pemerintahan saya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/10).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Pertamina sebagai *National Oil Company* (NOC) milik Indonesia dan Sonangol EP NOC milik Angola. Jokowi berharap kerja sama antar-pemerintah bisa memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Dia mengimbau kementerian terkait untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama itu melalui skema teknis. "Kalau tidak bisa dirasakan oleh rakyat, tidak usah tanda tangan," ujarnya.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan pembelian minyak dari Angola ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar USD 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun sehari. Sudirman mengatakan nilai dan volume pembelian minyak dari Angola masih dibahas. Namun Sudirman memberi gambaran, jika Indonesia mampu membeli 100 ribu barel sehari, nilai impor minyak yang selama ini dibelanjakan bisa ditekan hingga 25 persen. "Seperempat dari kebutuhan impor sudah dipenuhi oleh satu perusahaan," katanya.

Selain itu salah satu bukti kesepakatan dalam kerjasama ini adalah potongan harga atau diskon sebesar 15 USD per barel sesuai dengan harga minyak mentah dunia. Saat itu pemerintah berhitung akan dapat menghemat Rp15 triliun per tahun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Majalah AKTUAL menyebutkan kesepakatan antara Pertamina dan Sonangol tidak banyak menguntungkan Pertamina. Janji diskon 15 USD tidak dapat dipenuhi oleh Sonangol.

Disebutkan dalam dokumen tersebut Pertamina dan Sonangol melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti *MoU* yang diteken di Istana Negera tersebut pada bulan November. Tiga kali pertemuan digelar di Singapura dan Jakarta, hasilnya diskon tidak dapat diberikan oleh Sonangol. "Sonangol tidak dapat memberikan diskon sebesar 15 USD/bbl di bawah harga pasar untuk minyak mentah dari Angola," seperti dikutip dalam dokumen tersebut.

Potensi penghematan sebesar 15 triliun baru didapatkan jika Pertamina dan Sonangol selesai merampungkan kerjasama tiga bidang meliputi bisnis hulu, bisnis hilir dan kerjasama ekspor impor. Diluar itu harga yang ditawarkan oleh Sonangol sama dengan yang disodorkan oleh peserta tender via ISC. Artinya tanpa pemberian paket khusus seperti dijanjikan saat awal *MoU* Sonangol telah mendapat keistimewaan tanpa harus mengikuti tender seperti Socar NOC Azerbaijan dan Vitol milik Nigeria.

Sekelumit tentang proses tender pengadaan minyak pertama yang dilakukan ISC ini sebenarnya hanya satu dari berbagai fakta negatif kinerja Pertamina di bawah pimpinan Dwi Sutjipto. "Kita akan panggil Pertamina untuk menjelaskan semua ini. Kita garang dan kritis, jadi semua harus jelas," kata Ketua Komisi VI DPR Hafidz Tohir.

Menagih Janji Manis Pertamina

Banyak janji dilontarkan Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto ketika resmi ditunjuk pada akhir 2014 silam. Janji itu mudah diingat jika membongkar dokumen-dokumen pemberitaan media massa khususnya tentang lima fokus kerja Pertamina 2015.

Dalam rencana kerja itu, Dwi Sutjipto mengatakan bahwa fokus pertama adalah melakukan percepatan pengembangan bisnis hulu. Dalam hal ini, Dwi Sutjipto sesumbar mampu memperkuat lini bisnis di *upstream* seperti mendorong eksplorasi. Pertamina pun meminta agar pemerintah memberikan blok yang kontraknya telah habis.

Janji kedua yang disampaikan Dwi Sutjipto adalah melakukan efisiensi. Dalam hal ini, dia menyebut pemindahan kewenangan Petral ke ISC dalam proses pengadaan minyak adalah cara efektif untuk melakukan efisiensi. Namun pada kenyataannya, janji efisiensi ini menimbulkan kritik lantaran proses tender justru

dilakukan jauh dari transparansi. Kuat dugaan adanya kongkalikong dan pesanan untuk memenangkan pihak tertentu dalam proses tender.

"Ada indikasi bahwa yang ikut tender adalah para *trader*. Padahal janji awal Tim Reformasi adalah menghindari melakukan impor melalui *trader*, melainkan langsung ke perusahaan minyak baik *Multinational Oil Company* maupun *National Oil Company*. Jika ini terjadi maka Sudirman Said dkk telah melakukan kebohongan publik," ujar Pengamat ekonomi

energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.

Adapun janji keempat yang perlu ditagih terkait peningkatan daya saing ritel. Pertamina sering berucap tentang rencana perkuat jaringan ritel yang erat kaitannya dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM jenis premium. Kebijakan inilah yang membuat masyarakat tercekik lantaran harga BBM tidak menentu. Disisi lain, pencabutan subsidi BBM Premium pada akhirnya mengharuskan Pertamina siap



menghadapi persaingan dengan ritel lain.

Janji manis lain yang pernah dilontarkan Dwi Sutjipto adalah membenahi sektor keuangan melalui upaya pengembalian piutang-piutang Pertamina yang ada di pemerintah, khususnya di PLN. Namun hingga kini, belum dijelaskan secara gamblang bagaimana proses pengembalian piutang itu akan dilakukan.

Kebijakan Mencekik Rakyat

Setali tiga uang dengan

Pertamina, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sejauh ini cukup berhasil meliberalisasi pengelolaan sektor energi nasional. Kapitalisme yang mencengkeram negara semakin nyata setelah adanya kebijakan pencabutan subsidi BBM jenis premium. Belakangan, kebijakan ini semakin tidak jelas lantaran pemerintah bingung menentukan harga yang semakin simpangsiur.

Pada awal Februari lalu, pemerintah berjanji akan menurunkan kembali harga BBM,

namun janji ini diingkari sendiri melalui *statemen* Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja, bahwa harga BBM premium maupun solar masih tetap sama seperti keputusan terakhir pada 19 Januari lalu. Artinya, harga BBM premium tetap Rp 6.600 per liter, sedangkan solar bersubsidi dari Rp 6.400 per liter.

Tidak menentunya kebijakan pemerintah soal harga BBM ini membuat masyarakat sering bertanya kepada para legislator yang mewakilinya. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil Bengkulu Ahmad Kenedy. Dia mengatakan kebijakan pemerintah soal harga BBM sangat meresahkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Saya banyak ditanya oleh konstituen di daerah, kenapa kok harga bensin tidak menentu. Ingat, harga-harga sembako dan angkutan umum mencekik rakyat akibat harga BBM tidak menentu. Pemerintah jangan remehkan soal ini,” kata Kenedy.

Senator kawakan ini juga menyalahkan para menteri, khususnya Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak bisa menjawab keresahan masyarakat atas himpitan ekonomi yang sudah akut.

Kebijakan pemerintah yang dua kali menurunkan harga BBM, lanjut Kenedy, justru semakin membingungkan lantaran tidak diikuti oleh penurunan harga kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan daya beli masyarakat juga dirasa tidak membaik sehingga kesulitan ekonomi masyarakat semakin sulit diurai.

“Inilah yang sebenarnya ingin kami tanyakan kepada pemerintah melalui hak tanya DPD. Tapi jawaban pemerintah selalu normatif. Rakyat kita kan taunya bagaimana agar harga-harga bisa normal dan masyarakat mampu membelinya,” tandas Kenedy. ■

Moh Sahlan



Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kilogram Semrawut

Pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 Kilogram (Kg) masih semrawut. Gas elpiji bersubsidi ini digunakan secara liar sehingga kerap terjadi kelangkaan yang merugikan rakyat.

"Harusnya ada aturan yang jelas soal elpiji 3kg ini agar pelaksanaannya menjadi baik. Sekarang kan tak ada pemisahan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji bersubsidi itu dan siapa yang tidak berhak," ujar Pengamat Kebijakan Energi dari Puskepi, Sofyano Zakaria di Jakarta akhir Februari 2015.

Regulasi soal pengawasan distribusi elpiji 3kg sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 tahun 2011. Namun aturan ini tidak efektif



dalam penerapannya.

"Aturan itu cenderung dilanggar sendiri oleh Pemerintah dengan uji coba pemakaian LPG 3kg untuk nelayan. Maka tidak heran bila masyarakat menengah ke atas

juga ramai-ramai pindah dan menggunakan LPG 3kg untuk pemanas air (*water heater*) bahkan digunakan pula untuk 'omprongan' tembakau bagi industri rokok," tuntasnya. / Moh Sahlan

Jangan Ada Diskriminasi Status Pekerja di Blok Mahakam

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat akan memprotes keras jika ada diskriminasi terhadap nasib karyawan PT Total EP dengan karyawan PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok Mahakam.

PT Pertamina (Persero) sendiri telah memiliki skema sendiri terhadap nasib karyawan Total E&P Indonesia yang bekerja untuk Blok Mahakam bila nanti pengelolaan lapangan itu

diserahkan kepada Pertamina.

"Jangan ada diskriminasi status pekerja di Blok Mahakam jika nanti Pemerintah serahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Sesuaikan jabatan pekerjaannya dengan gaji yang biasa diberlakukan di pengupahan perusahaan plat merah yang selama ini diberlakukan. Jangan ada hak istimewa terhadap eks karyawan Total E&P Indonesia jika nanti dikelola oleh Pertamina. Jadikanlah mereka pekerja Pertamina, bukan Total E&P lagi,"

kata Binsar di Jakarta, Selasa (24/2).

Sejak 2012, Ketua Serikat Pekerja Nasional Total Indonesia (SPNTI) Fauzan Muttaqin sudah pernah menyuarakan hal serupa pada konteksnya untuk tingkat kesejahteraan pekerja.

"Bukan perbedaan peralihan statusnya karena dari perusahaan asing yang kemudian jadi diistimewakan atau tingkat pengupahannya yang lebih besar ketimbang pekerja Pertamina, dalam satu jabatan atau pekerjaan yang sederajat. Jika terjadi, ini jelas diskriminasi. Mereka (Karyawan Total) harus mengikuti aturan pengupahan yang diberlakukan perusahaan sebagai Pekerja Pertamina," jelasnya.

"Mohon Bung Eko Wahyu yang baru menjadi Presiden FSPPB menggantikan Bung Ugan Gandar, tidak perlu berucap yang bisa membikin keresahan bagi pekerja Pertamina jika skema yang dimaksud menjadi diistimewakan," tandasnya. / Ismed Eka



Indonesia Rajanya Potensi Geothermal

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energi Rony Gunawan mengungkapkan, potensi Geothermal (Panas Bumi) Indonesia sangat besar. Bahkan, jika diibaratkan, Indonesia bagaikan timur tengahnya panas bumi.

"Terbukti 2,28 Giga Watt (GW), kemungkinan 823 MW dan terduga 13,413 GW. Paling besar panas bumi di Sumatera dan Jawa," kata Rony di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (24/2).

Terkait proses bisnisnya, masa eksplorasi panas bumi dapat mencapai dua hingga tiga tahun, dan masa pengembangan hingga lima tahun. "Untuk izinnya, memakai izin pinjam pakai kementerian Kehutanan karena ini kawasan cagar alam jadi perizinan masuk kawasan hutan."

Saat ini kapasitas terpasang di Lahendong (Sulawesi Utara) sebesar 110 Mega Watt (MW), Kamojang (Garut) sebesar 200 MW, Ulubelu (Lampung) sebesar 110 MW. Pada tahun 2017, kapasitas terpasang energi



panas bumi ditarget mencapai 672 MW dan lima tahun ke depan sampai 900 MW. "Kita harapkan 2016 bisa memasok untuk Sumatera," terang dia.

Meski memiliki potensi besar, namun kontribusi geothermal

dalam bauran energi nasional masih sekitar 5%. "Dibutuhkan USD5 juta untuk menghasilkan 1 MW. Karena mau tidak mau pembangunan ini harus jalan, kita butuh turbin," tandasnya. / Ismed Eka



Korea Selatan (Korsel) mengaku tertarik berinvestasi di sektor pipa gas di Indonesia. Selain pemasangan, investor negeri ginseng juga siap membangun pabrik pipa gas dengan bahan baku dari PT Krakatau Steel (persero) Tbk.

"Korsel memang menyatakan keinginan itu. Selain pemasangan pipa gas, juga soal rencana membangun pabrik pipa gas di Indonesia dengan bahan baku dari Krakatau Steel. Namun, Korsel belum menyampaikan nilai investasinya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kerjasama Industri Kementerian

Korsel Kepincut Bangun Pipa Gas di Indonesia

Perindustrian, Dyah Winarni di Jakarta, Februari 2015.

Dyah juga menyebut Korsel serius ingin menanamkan investasi di Indonesia karena mereka sangat aktif bertanya dan mendalami bagaimana aturan main investasi itu. Para pengusaha korsel pun rajin menghadiri seminar soal peluang dan prospek investasi di Indonesia.

"Kami (Kementerian Perindustrian) juga diminta menjelaskan bagaimana proses investasi di Indonesia. Bagaimana proses perizinannya," ucap Dyah.

Korsel sebenarnya bukan pemain baru dalam hal investasi di Indonesia. Negeri ginseng ini selalu menempati lima besar investor di Indonesia, bahkan kurun 2010 hingga 2014 nilai investasi Korsel terus meningkat.

Namun belakangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut korsel tersingkir dari posisi 5 besar investasi di Indonesia pada periode 2014. Nilai investasi Korsel tahun lalu sebesar USD 1,1 miliar atau turun dibanding tahun 2013 sebesar USD 2,2 miliar. / Moh Sahlan



Foto kiri: Haider al-Abadi

Foto kanan: Menteri Pertahanan Irak Khaled al-Obeidi menembakkan senapan di lokasi latihan menembak dalam kunjungannya ke pangkalan militer Irak di Kamp Taji, Baghdad, Rabu (25/2).

Melawan Skenario Pemecahbelahan Irak

Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari 2015. Selama sekitar dua minggu, ia dijadwalkan mengunjungi berbagai kota di negeri kaya minyak yang sering dilanda perang itu. Berikut ini adalah laporannya.

“Jangan mudah percaya dengan laporan media massa Barat tentang konflik sektarian di Irak,” ujar Des Alwi, mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Irak, yang telah satu setengah tahun bertugas di KBRI Baghdad, Januari 2015. Lulusan jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia itu kini sudah ditugaskan ke pos diplomatik lain di Eropa.

“Media Barat sering menulis soal konflik keras antara warga Sunni versus Syiah di Irak. Tetapi itu sebetulnya hanya di tataran politik. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Syiah dan Sunni di Irak biasa tinggal berdampingan, bertetangga, dan rukun-rukun saja,” lanjut Des Alwi, yang selama bertugas di KBRI Baghdad tidak membawa istri dan anaknya, yang tetap tinggal di

Indonesia.

Larangan membawa keluarga itu adalah aturan standar untuk semua staf KBRI Baghdad, sejak kantor KBRI dibuka kembali pada 2012. Kantor KBRI sempat dikosongkan ketika terjadi invasi militer Amerika Serikat ke Irak, yang berujung dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Irak Saddam Hussein pada 2003. Saat itu semua staf KBRI diungsikan karena pertimbangan keamanan.

Aktivitas KBRI Baghdad kini telah dihidupkan kembali dan dipimpin oleh Duta Besar Safzen Noordin, yang pernah menjadi Komandan Korps Marinir TNI-AL. Penunjukan Safzen yang berlatar belakang militer mungkin tepat, karena Irak memang daerah rawan dan membutuhkan duta besar dengan kualifikasi khusus.

Kini kondisi keamanan di Irak dianggap sudah jauh lebih kondusif,

meski letupan konflik—seperti ledakan-ledakan bom di tempat umum—terkadang masih terjadi. Maka Baghdad (Irak), bersama dengan Tripoli (Libya), Kabul (Afghanistan), dan Sana’a (Yaman), oleh Kementerian Luar Negeri RI masih dikategorikan sebagai daerah penugasan yang berbahaya. Jadi, larangan bagi staf KBRI untuk membawa keluarga itu tetap diberlakukan.

Menguasai Sumber Daya Strategis

Untuk melihat dan mengetahui keadaan Irak yang sebenarnya memang tidak cukup dengan mengandalkan referensi media massa Barat, yang sering bias dalam memberitakan masalah Irak. Tetapi kita perlu datang dan melihat langsung situasinya ke Irak. Banyak kepentingan asing yang bermain di sini, dan media massa Barat *mainstream* adalah juga bagian dari kepentingan tersebut.

Apalagi Irak ada di negeri Arab



yang menempati posisi strategis. Mayoritas warganya beragama Islam, yang terbagi dalam tiga kelompok etnis dan sektarian besar, yakni warga Syiah, Sunni, dan Kurdi. Dari 36 juta penduduk Irak, dilihat dari aspek agama, penganut Muslim Syiah mencapai sekitar 60-65 persen, dan penganut Sunni 32-37 persen. Sedangkan dilihat dari aspek etnis, mayoritas 75-80 persen penduduk Irak adalah bangsa Arab. Kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi (15-20 persen), Asiria, Turkmen Irak, dan lain-lain (5 persen), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri itu.

Dalam konteks minyak bumi sebagai sumber daya strategis dunia, Irak adalah negara yang kaya minyak dan menguasai cadangan minyak terbukti yang sangat besar. Cadangan minyak Irak hanya kalah dari Arab Saudi. Daerah minyak Irak banyak berlokasi di wilayah etnis Kurdi di bagian utara. Konflik politik internal dan eksternal Irak, yang menyangkut penguasaan wilayah, dengan demikian juga tidak bisa dipisahkan dari motivasi menguasai sumber-sumber minyak tersebut.

Dengan latar belakang seperti itu, tak heran jika Irak menjadi obyek pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, perusahaan

perminyakan raksasa, industri pertahanan, dan banyak lagi. Saat ini mayoritas alat utama sistem persenjataan militer Irak didominasi pasokannya oleh industri pertahanan AS. Maklum, sebagai kekuatan penakluk utama, pasukan AS masih bercokol di Irak dan mereka tentu tidak mau rugi, sesudah capek-capek berperang dan mengeluarkan ongkos besar untuk sampai di sini. Posisi pemasok kedua dikuasai Rusia, yang merupakan pemasok senjata tradisional Irak sejak zaman Saddam.

Berbagai Masalah Krusial di Irak

Saat ini ada berbagai masalah krusial yang dihadapi Irak. Dalam sisi ekonomi, merosotnya harga minyak dunia sampai ke titik terendah tahun-tahun terakhir ini sangat merugikan Irak. Hal ini karena minyak bumi adakah komoditi andalan Irak untuk menghidupkan ekonominya. Ekspor minyak juga merupakan mayoritas penyumbang devisa bagi Irak. Sesudah negeri ini hancur lebur akibat perang, Irak butuh anggaran besar untuk membangun kembali infrastrukturnya.

Masalah krusial kedua, kali ini di bidang politik, adalah belum mantapnya dan belum stabilnya kehidupan politik Irak. Pembagian kekuasaan di pemerintahan Irak pasca invasi AS –antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi—masih butuh proses panjang untuk mencapai kestabilan. Pola hubungan yang sarat kepentingan itu harus dikelola dengan hati-hati. Tujuannya adalah untuk menghindari gesekan yang bisa berdampak pada konflik terbuka dan kekerasan, yang berkelanjutan dan memakan banyak korban di lapangan.

Harus diakui, ada usaha tulus dari para politisi dari berbagai kubu untuk mencapai rekonsiliasi. Pada 2014, parlemen Irak menyetujui pembagian kekuasaan di pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi. Abadi berasal dari Partai Dawa, partai Islamis Syiah yang sebelumnya dipimpin PM Nouri al-Maliki. Langkah inklusi

politik ini, yang mencoba merangkul berbagai kelompok yang bersaing dan berseteru di Irak, cukup membesarkan hati.

Hal itu khususnya menjadi penting ketika pasukan Irak masih berjuang melawan kelompok radikal Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Milisi ISIS sampai saat ini masih bercokol di wilayah Irak dan menguasai wilayah yang sangat luas di barat laut, terutama yang berbatasan dengan Suriah. Sulit meredam agresivitas militer ISIS, jika di antara kubu Syiah, Sunni, dan Kurdi Irak masih sibuk berkonflik sendiri.

Sebelum tercapai kompromi, selama berminggu-minggu dua posisi menteri kunci di kabinet Irak –Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri—tetap belum terisi. Para pengamat politik pada awalnya merasa was-was, apakah para politisi Syiah, Sunni dan Kurdi akan mampu berkompromi pada pos-pos keamanan yang sangat penting ini. Untunglah, para politisi Irak ternyata masih sanggup berkompromi, dan dua jabatan kosong itu akhirnya terisi pada Oktober 2014.

Merangkul Kubu Garis Keras

Ditunjuknya Mohammed al-Ghabban, yang berasal dari Organisasi Badr, sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru dapat dipandang sebagai langkah taktis, untuk merangkul sekaligus meredam kelompok garis keras. Begitu juga, pemilihan Khaled al-Obeidi sebagai Menteri Pertahanan yang baru juga menunjukkan upaya serius untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Obeidi sebelumnya menjabat sebagai penasihat bagi Gubernur Provinsi Nineveh.

Ketika kota Mosul jatuh ke tangan ISIS pada musim panas 2014, Obeidi menekankan perlunya pemberian otonomi yang lebih besar pada kawasan-kawasan di Irak dan bahkan penciptaan tentara Arab Sunni yang terpisah. Sebagai catatan, milisi ISIS adalah penganut Muslim

Sunni, dan salah satu faktor yang membuat cepatnya gerak maju milisi ISIS di Irak adalah karena adanya dukungan dari sebagian warga Sunni –yang tidak puas pada kebijakan pemerintah pusat Irak-- di wilayah bersangkutan.

Sebagai alternatif, bisa jadi penunjukan-penunjukan inklusif di jabatan kunci pemerintahan itu hanyalah sekadar barter politik biasa. Namun, ketika kekerasan belum menunjukkan tanda-tanda mereda, para pemimpin Irak tampaknya akan menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari kelompok sektarian ekstrem.

Jika pemerintah gagal bertindak lebih dari sekadar melakukan bagi-bagi kekuasaan pada jabatan-jabatan tingkat tinggi, hal ini justru hanya akan memberi bahan bakar pada konflik atau perang saudara yang terus berlangsung, dan bisa menjurus ke kondisi yang lebih berbahaya. Yakni, pemisahan wilayah (partisi teritorial) sesuai dengan garis sektarian dan garis etnis. Singkatnya, wilayah Irak bisa terpecah jadi tiga bagian atau tiga negara, yakni kawasan yang didominasi Syiah, Sunni, dan Kurdi.

Nicholas Sambanis dan Jonah Schulhofer-Wohl dalam *Foreign Affairs* (1 Desember 2014) mengatakan, ide partisi teritorial itu kedengarannya cukup disukai untuk menyelesaikan konflik sektarian di Irak yang berlarut-larut. Setidaknya, para perancang strategi di Amerika telah memikirkan ide partisi itu, ketika terjadinya puncak konflik sektarian antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi di Irak pada 2006.

Berbagai Skenario Pemisahan wilayah

Joseph Biden, Wakil Presiden AS yang saat itu masih menjadi senator, dan Leslie Gelb, Presiden Emeritus Dewan Hubungan Luar Negeri, sempat mengajukan rencana “partisi lunak” (*soft partition*) Irak. Chaim Kaufmann, pakar hubungan internasional, juga beranggapan bahwa hanya lewat pemisahan



populasi Irak sesuai garis sektarian dan garis etnislah maka kekerasan antar kelompok ini bisa berakhir. Konflik berdarah yang meningkat pada musim panas 2014 telah menghidupkan kembali gagasan partisi ini.

Dalam tulisannya di *Washington Post*, kolumnis Fareed Zakaria juga menyarankan agar AS mengadopsi realitas adanya *enklave* atau kantong-kantong sektarian di Irak. Bahkan Steven A. Cook dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengisyaratkan bahwa AS mungkin harus menerima partisi penuh Irak, meskipun proses itu mungkin akan “berdarah-darah dan berkepanjangan.”

Sementara itu, peristiwa-peristiwa di Suriah juga menghidupkan lebih jauh perdebatan tentang pembagian wilayah tersebut. ISIS dengan gigih dapat bertahan dan menguasai sebagian wilayah Suriah, meski harus menghadapi serangan udara yang dipimpin AS. Pasukan Suriah yang setia pada Presiden Bashar al-Assad juga terbukti tak mau menyerah.

Maka pada November 2014, pakar tentang Suriah, Joshua Landis, dalam acara GPS di jaringan televisi CNN menyatakan, ia mendukung rencana partisi Suriah. Landis berargumen bahwa partisi teritorial itu akan “menerima realitas” adanya negara Sunni, yang terbentang dari

sebagian wilayah Suriah ke sebagian wilayah Irak. Pemisahan semacam itu dipandang akan lebih stabil dan –seperti ditambahkan Fareed Zakaria dalam acara yang sama-- akan “mencerminkan realitas-realitas sektarianisme.”

Argumen yang sering dilontarkan dari kalangan pendukung partisi adalah bahwa, ketika pertarungan etnis dan sektarian sudah menjadi terlalu berdarah-darah, tak seorangpun yang akan sanggup memulihkan keadaan seperti semula dan menyatukan kubu-kubu etnis dan sektarian itu lagi.

Perang telah mengungkapkan dan mengangkat kembali garis-garis pemisah di tataran sosial negara bersangkutan. Dengan demikian, begitulah menurut alur pemikiran yang disodorkan, satu-satunya jalan keluar dari siklus pertumpahan darah yang berbasis identitas dan terus-menerus berulang, adalah dengan merumuskan garis perbatasan-perbatasan wilayah resmi yang baru. Penentuan garis perbatasan baru itu disesuaikan dengan skema pemisahan yang bersifat etnis dan sektarian.

Anggapan Dasar yang Lemah

Argumen di atas kedengarannya seolah-olah masuk akal, namun sebenarnya argumen itu didasarkan



Foto kiri: Anak pengungsi Suriah (korban ISIS dan perang di Suriah) yang menjadi pengemis di Erbil, Kurdistan, Irak.

Foto kanan: Foto anggota Peshmerga (Milisi Kurdi) yang dibunuh oleh ISIS. Sengaja dipasang di mobil Kurdi sebagai peringatan.

pada anggapan dasar yang cacat atau lemah. Ia memperlakukan identitas sosial sebagai sesuatu yang terberikan (*given*) dan mengabaikan fakta bahwa ini adalah soal politik –dan bukan soal identitas itu sendiri— yang menyebabkan kelompok Sunni dan Syiah berperang, tak lama sesudah invasi AS ke Irak. Jauh dari menyelesaikan perselisihan, partisi justru dapat mengaktifkan kembali garis-garis pemisah yang sudah lama terpendam.

Dan di akhir semuanya, pembentukan sebuah negara baru biasanya justru mengubah mantan sekutu menjadi musuh satu sama lain. Ini sudah terjadi di Sudan Selatan (mayoritas warganya non-Muslim), yang dilanda konflik berkelanjutan justru sesudah partisi atau dipisahkan dari Sudan (mayoritas warganya Muslim) pada 2011.

Negeri itu kini rusuh karena menghadapi perlawanan dengan kekerasan dari Gerakan Pembebasan Sudan Selatan atau SSLM (South Sudan Liberation Movement) dan Gerakan Demokratik Sudan Selatan atau SSDM (South Sudan Democratic Movement). Anggota SSLM dan SSDM semula adalah sesama pejuang, yang berjuang bahu-membahu melawan pasukan Sudan di utara, untuk menuntut kemerdekaan bagi Sudan Selatan.

Selain itu, Sudan Selatan juga dilanda bentrokan antar-etnis tentang bagaimana cara pembagian kekuasaan di negara baru tersebut. Penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sejarah perang saudara, yang terkait dengan pemisahan wilayah, menunjukkan bahwa partisi biasanya tidak mendorong perdamaian. Dalam sejumlah kasus, pemisahan wilayah justru membuat situasi lebih buruk.

Sejak 1945, sekitar 180 perang saudara, di mana lebih dari separuhnya bersifat etnis atau sektarian, telah menghasilkan 14 sampai 21 partisi, tergantung pada bagaimana kita menghitungnya. Kasus-kasus partisi ini bisa berbentuk hilangnya secara *de facto* kedaulatan terhadap kantong wilayah yang kecil, seperti terjadi di Siprus pada 1964 atau Somaliland pada 1991. Tetapi bisa juga berupa deklarasi kedaulatan secara terbuka dan tuntas, dengan didukung pengakuan dari dunia internasional, seperti kasus Eritria dan Kroasia pada 1991.

Bukan Solusi yang Baik

Ketika membandingkan kasus-kasus ini dengan berbagai konflik lain yang tidak berakhir dengan partisi, tidak ditemukan bukti yang bersifat etnis ataupun sektarian bahwa partisi bisa mencegah munculnya perang baru. Data ini secara sederhana justru menunjukkan, pemisahan wilayah bukanlah solusi yang baik terhadap perang saudara berlarut-larut, yang bersifat etnis ataupun sektarian.

Bentuk lunak dari partisi –seperti pembangunan kantong-kantong wilayah terpisah—tampaknya juga tidak menyelesaikan konflik. Di Siprus, sesudah periode singkat konflik antar-komunal pada 1963, warga Siprus keturunan

Turki (Turkish Cypriots) mulai terkonsentrasi di kantong-kantong etnis yang bisa mereka pertahankan dengan mudah.

Mereka menggagalkan struktur administratif terpisah di kawasan-kawasan itu, serta mengimpor senjata dan pejuang-pejuang dari Turki. Ini adalah partisi yang sedang berlangsung. Kantong-kantong wilayah ini membuat rekonsiliasi nasional di Siprus jadi jauh lebih berat. Kantong-kantong wilayah ini bertindak sebagai pijakan kaki, yang kemudian dimanfaatkan Turki untuk melakukan invasi pada 1947, yang akhirnya membelah pulau itu jadi dua.

Dalam kasus lain, perang justru pecah lagi setelah partisi. Ini terjadi di Kroasia, yang memisahkan diri dari Yugoslavia pada 1991. Kroasia lalu terlibat lagi dalam perang separatis pada 1992-1995 melawan warga Serbia Kroasia (Serbian Croats), yang ingin memisahkan diri dari Kroasia dan bergabung dengan Serbia.

Menyatukan negeri dengan merangkul berbagai kubu dan kepentingan bukanlah tugas yang mudah. Namun, hal ini harus diperjuangkan terus-menerus secara teguh, jika memang sebuah negeri Islam yang multi-etnis seperti Irak ingin maju. Negeri yang warganya mudah dipecahbelah dengan isu komunal, seperti isu kesukuan atau agama, akan mudah pula dikuasai oleh kepentingan asing.

Oleh karena itu, berkaca dari kasus Irak, Indonesia sendiri harus waspada jika saat ini ada upaya-upaya yang tampaknya ingin membenturkan warga Muslim Sunni (Ahlus Sunnah wal Jamaah) dengan warga penganut Syiah, yang posisinya di Indonesia adalah minoritas. Rakyat tidak boleh mudah terpancing oleh isu-isu artifisial, seperti isu Sunni versus Syiah, atau saling mengkafirkan dan saling menganggap sesat satu terhadap yang lain, yang ujung-ujungnya akan melemahkan ketahanan nasional Indonesia. ■

Satrio Arismunandar

Terpidana Mati Andrew Chan Sudah Tobat



Michael Chan, kakak kandung terpidana mati asal Australia, Andrew Chan meminta Pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada adiknya untuk bebas sekali lagi. Dia menjamin adiknya telah sepenuhnya bertobat.

"Saya tidak tahu harus bicara apa lagi. Saya hanya berharap Pemerintah Indonesia bisa melihat langsung bagaimana pertobatan adik saya di tempat ini (Lapas Kerobokan)," ucap Michael, Minggu (22/2).

Michael mengaku ini kali pertama kunjungannya diberi waktu lebih hingga hampir tiga jam. Biasanya,

kata Michael, ia hanya diberi waktu berkunjung selama satu jam saja. "Ini pertemuan terlama saya. Biasanya tidak lebih dari satu setengah jam," papar dia.

Andrew yang datang mengenakan celana pendek baju abu-abu itu mengaku memahami hukum di Indonesia. Hanya saja, ia berharap Pemerintah Indonesia dapat menilai ulang perilaku adiknya, yang menurutnya sudah benar-benar tobat.

Michael akan mengucapkan terima kasih yang besar kepada Pemerintah Indonesia jika adiknya diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi. Dia berharap Pemerintah Indonesia dapat memberi kesempatan kepada adiknya untuk direhabilitasi di negaranya.

"Saya sangat berterimakasih jika Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pada adik saya untuk direhabilitasi. Kami sekeluarga siap untuk selalu mendampingi," tutur Michael. / Bobby Andalan

Bayi Dibuang di Aceh, Istri Ditembak di Malang

Warga Jalan Bareng Raya, Kota Malang, Jawa Timur, Nurwati (40), ditembak suaminya sendiri. Sementara di Aceh, bayi berusia tujuh hari dibuang ibunya di sebuah bangunan rumah dan toko (ruko). Dua kisah tragis terpisah.

Nurwati meregang nyawa setelah ditembak secara tidak sengaja oleh suaminya, Rizki Kusmariyanto. Cerita bermula saat mereka berkunjung ke rumah saudaranya Arif, di Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (17/2).

Saat keduanya duduk di ruang tamu, Rizki melihat senapan angin milik Arif. Ia beranjak dari kursinya dan mengambil senapan dimaksud. Tanpa sengaja senapan itu mengarah ke dada istrinya. Setelah memegang-megang, senapan tiba-tiba meletus mengarah ke istrinya.

"Tiba-tiba meletus tepat di dada korban," ucap saksi mata, Edy Rendiani (43), karyawan bengkel milik Arif.

Korban kemudian dibawa ke Kamar Mayat Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang untuk dilakukan autopsi. Sang suami yang menyesali perbuatannya tampak menangis tiada henti, dan sempat ditenangkan oleh sanak saudaranya.

Di Aceh, sesosok bayi ditemukan di ruko Pasar Pagi, Capa, Kota Juang, Bireun, Aceh pada Selasa (17/2). Informasi dihimpun Aktual, bayi berusia tujuh hari itu setinggi 48 cm dengan berat 3,6 kg ditemukan. Pipi bayi itu masih memerah dan tali pusar masih menempel di perutnya.

"Awalnya yang melihat bayi itu yakni Fahrul. Dia sedang menaiki sepeda motor di lokasi temuan bayi. Tanpa sengaja lampu motornya menyorot dan melihat bayi," kata saksi mata, Mursyidin.

Bayi itu kini dirawat Rumah Sakit Umum Fauziah Bireuen. Aparat kepolisian setempat sedang menyelidiki kasus pembuangan bayi tersebut. / Muhammad Nasrul Hamzah - Masriadi Sambo

Di Sumut, Masih Ada Gaji Guru Swasta Rp100 Ribu

Rendahnya apresiasi terhadap kehidupan tenaga pendidik (guru) masih terjadi di Sumatera Utara. Tenaga pendidik guru swasta, masih ada yang mendapatkan honor hanya Rp100 ribu per bulan.

"Bagaimana guru dapat mengajar dengan serius jika apresiasi yang didapatnya sangat rendah," tegas Wagub Sumut, Tengku Erry Nuradi saat menerima informasi dari Badan Musyawarah Penguruan Swasta (BMPS) Sumut di kantornya, Rabu dua pekan lalu.

Wagub yang dapat informasi tersebut merasa terkejut. Kondisi itu menurutnya merupakan bukti rendahnya apresiasi kepada tenaga pendidik di Tanah Air. Ia lantas mengatakan bagaimana Jepang saat sekutu menghancurkan Kota Nagasaki



dan Hiroshima.

Saat itu, Kaisar tidak bertanya berapa panglima perang yang masih hidup. Tetapi berapa guru yang tersisa. Kaisar optimis akan membangun negara jika masih banyak guru yang tersisa. Hasilnya, Jepang menguasai perekonomian dan teknologi dunia saat ini.

Ia menyinggung besaran dana pendidikan dari APBN mencapai 20 persen. Dana itu digunakan untuk Bantuan Operasi Sekolah (BOS), salah satunya untuk mendukung tingkat kesejahteraan guru swasta.

"Standarisasi gaji guru swasta baiknya segera dirumuskan. Dengan demikian, sekolah swasta dapat berperan dalam melahirkan generasi muda berkualitas," kata Erry.

/ Damai Oktavianus Mendofo

Aher : Suku Sunda Etnis Terbesar Kedua di Indonesia



Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Suku Sunda menjadi etnis terbesar kedua di Indonesia setelah Suku Jawa yakni jumlahnya sekitar 45 juta orang dari total jumlah penduduk.

"Orang Sunda adalah etnis kedua terbesar di Indonesia, kontribusinya

untuk tanah air dari zaman dulu sudah jelas atau terlihat," kata Aher usai menghadiri deklarasi Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Pangumbaran/Pengembara (Formas), di Bali, Sabtu dua pekan lalu.

Menurutnya, pada era sebelum kemerdekaan RI banyak tokoh Jawa

Barat yang memberikan kontribusi di kancah nasional. Contohnya mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin asal Sumedang, kemudian Ir H Juanda dengan Deklarasi Djuanda sebagai awal kejayaan maritim Indonesia dan Otto Iskandardinata.

Selain itu, 80 persen pergerakan yang bersifat nasionalis dan agamis di Indonesia terlahir di Bandung, Jawa Barat. Masyarakat Jabar merasa bangga pada era pergerakan nasional dalam rangka merebut kemerdekaan RI.

Lahirnya Formas, disebut Aher bukan untuk memunculkan aspek kesukuannya dari NKRI namun untuk mempertegas masyarakat atau etnis Sunda di Indonesia.

"Dari sisi keanugerahan, orang Jawa Barat dapat anugerah besar dari Tuhan. Makanya saya minta paguyuban orang Sunda tidak memisahkannya dengan Jabar dan Banten. Nggak ada perbedaan antara Jabar dan Banten," katanya.

/ Albertus Vincentius

Ratusan Pulau di Manggarai Barat Rawan Dijualbelikan

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula meminta pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pelaksana penjabaran pengawasan pulau kecil. Dengan begitu keberadaan pulau kecil bisa dipantau dan diatur oleh pemerintah daerah.

"Penjualan pulau yang dilakukan atas nama individu, sulit dipantau, Sementara ratusan pulau di Manggarai Barat, rawan dijualbelikan, karena diklaim milik orang per orang. Apalagi, setelah Komodo ditetapkan sebagai salah satu keajaiban dunia," katanya saat dihubungi Selasa dua pekan lalu.

Ia mengungkapkan, dari 264 pulau yang ada di Manggarai Barat, hanya 13 pulau yang berpenghuni dan sembilan pulau yang memiliki pemerintahan daerah dan sisanya tidak berpenghuni. Hal ini memicu aksi jual beli pulau, salah satunya Pulau Punggu yang diiklankan

melalui Internet.

Pulau ini ditawarkan USD 11 juta, memiliki luas 117 hektare, berstatus sertifikat hak milik, dan hanya berjarak 20 menit dari Pulau Komodo.

"Data di pemerintahan Manggarai Barat, cuma ada tiga pulau yang disewakan ke asing untuk dikelola menjadi tempat wisata, yaitu Pulau Bidadari, Kanawa, dan Sebayur," jelasnya.

Kabar tentang penjualan pulau di Indonesia kembali merebak di dunia maya. Kali ini Pulau Punggu di Kabupaten Manggarai Barat, dikabarkan dijual dengan harga ratusan miliar. Melalui iklan yang diketahui dari situs Skyproperty,



Pulau Punggu dijual seharga Rp134,2 miliar.

Pulau Punggu berstatus sertifikat hak milik (SHM), dan keterangan mengenai pulau itu dimuat dalam versi bahasa Indonesia dan Inggris. Tak dijelaskan siapa pemilik pulau tersebut.

Pulau Punggu memiliki luas 117 hektar. Di pulau ini terdapat pantai dan terumbu karang yang menakjubkan. Tempat ini sempurna untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan. / Albertus Vincentius

Budayawan Muslim Berseteru, Tauhid Nomer Satu

Dhia Prekasha Yoedha

Dunia sastra Indonesia awal tahun 1963, gempar oleh kasus novel “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” karya satrawan ulama, Buya Hamka, yang didakwa plagiat oleh seorang satrawan dan pengasuh lembaran Lentera surat kabar ibukota Harian Bintang Timur, Pramoeodya Ananta Toer.

Berbulan-bulan, Pram menyerang Buya dengan tulisannya di Harian Bintang Timur dan Harian Rakyat corong resmi Partai Komunis Indonesia (PKI). Atas tuduhan itu, Buya bersikap tenang seakan tak terusik oleh hujan plagiat yang dilancarkan Pram.

Hingga tiba suatu hari, sebagaimana ditulis Andi Ryansyah, Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa, Buya didatangi sepasang tamu. Tamu perempuan asli orang Indonesia, dan tamu lelaki keturunan Tionghoa. Kepada Buya, tulis Andi dalam *www.islampos.com*, perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Astuti dan yang laki-laki Daniel Setiawan..

Namun, tulis Andi dalam artikel yang ditayangkan pada Selasa 4 Muharram 1436 / 28 Oktober 2014 pukul 19:12 itu, Buya sempat terhenyak sejenak, begitu Astuti memberitahu bahwa ia putri sulung Pramoeodya Ananta Toer. Namun setelah tertegun sebentar, Buya pun tersenyum.

Astuti ternyata menemui Daniel menemui Buya untuk belajar Islam dan menjadi mualaf. Astuti menuturkan kepada Buya, bahwa selama ini Daniel non-Islam. Padahal Pram tak setuju jika anak perempuannya yang muslimah menikah dengan lelaki berbeda kultur dan agama.

Yang luar biasa, seusai Astuti menyampaikan maksud kedatangannya, Buya tanpa syak dan ragu, berkata, “Baiklah.” Tanpa sedikitpun rasa dendam, maupun menyinggung bagaimana sikap ayah Astuti, Buya langsung membimbing calon menantu Pram itu membacakan dua kalimat syahadat. Kemudian novelis yang beberapa karyanya telah diangkat ke layar lebar ini, menyarankan Daniel segera berkhitan. Bahkan Buya pun menjadwalkan hari-hari yang pas untuk Daniel belajar Islam dengannya.

Sungguh seperti tak pernah terjadi apa-apa di antara

Buya dengan Pram. Padahal, Taufiq Ismail, penyair Angkatan 1966, pernah menorehkan kesaksian atas hubungan getir Buya dengan Pram dalam puisi Catatan Tahun 1965. Di puisi itu, menurut Muhidin M Dahlan, dalam buku *Aku Mendakwa Hamka Plagiat: Skandal Sastra Indonesia 1962-1964*, Scripta Manent: Yogyakarta, 2011, Taufik melukiskan hubungan menyakitkan dua budayawan Indonesia itu, sebagai berikut:

... Kita semua diperanjingkan
Gaya Rabies Klosongan
Hamka dihidahi Pram
Masuk Penjara Sukabumi ...



Gerangan apa yang sebenarnya terjadi yang melatari Astuti mengajak kekasihnya Daniel menemui Buya? Seorang teman Pram bernama Hoedifah Koeddah, menurut Andi, ternyata pernah bertanya langsung kepada Pram, apa alasan Tokoh Lekra ini mengutus calon mantunya menemui Buya.

Dengan serius Pram menjawab gamblang: “Masalah paham, kami tetap berbeda. Saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar Agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka. Dalam ceramah agama di TVRI, Buya Hamka-lah di Indonesia yang paling mantap membahas tauhid. Belajar Islam ya belajar tauhid.”

Kendati Pram tak minta maaf secara langsung, Hoedifah dalam majalah *Horison*, Agustus 2006, menilai dengan mengirim calon menantu ditemani anak perempuannya Pram sesungguhnya telah meminta maaf atas sikap kurang baiknya dalam memperlakukan Buya di Harian Bintang Timur dan Harian Rakyat. Dan secara tidak langsung pula, seperti kesaksian Irfan Hamka, putra Buya di dalam memoar *Ayah, Republika: Jakarta, 2013*, Buya pun memaafkan Pram melalui ketulusan ulama ini membimbing calon menantu Pram belajar Islam dan menjadi mualaf.

Subhanallah. Sesengit apapun dua budayawan Muslim berseteru, tetapi akidah dan tauhid tetap nomer satu. ■

Yuk Pasang Iklan Paket Hemat

PAKET PROMO IKLAN!



Aktual Magz

aktual.co



INFO DAN PEMASARAN :

Ajenk - 0812 1882 9528 / marketing@aktual.co

PT. CAPROF MEDIA NEGERI
Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22. Cawang Jakarta Timur



aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

**AKTUAL
BERGANTI
LOGO!**



Logo Baru, Semangat Baru!

MORE PROGRESSIVE!

"Aktual, selalu cepat dan tepat dalam pemberitaan,
menyampaikan kebenaran, terhangat, serta dapat dipercaya."